

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PROGRAM NUKLIR REPUBLIK ISLAM IRAN 2003-2008**

(Skripsi)

Oleh:

Dio TanBrani



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRGRAM NUKLIR REPUBLIK ISLAM IRAN 2003-2008

Oleh:
Dio TanBrani
0913033035

Kebudayaan politik Amerika Serikat yang memiliki rasa mengemban misi yang dimasukkan ke dalam tujuan religius ternyata memiliki banyak kesamaan dengan budaya politik Republik Islam Iran. Revolusi Islam 1979 akan mengikat Iran dan Amerika Serikat dalam sebuah hubungan ideologis yang intim, yang ditentukan oleh pengalaman kolektif bersama yang traumatis. Ketidakmampuan Amerika Serikat dalam menghadapi Iran pasca Revolusi Islam secara konstruktif mengakibatkan penggunaan cara dan metode yang tidak sesuai. Tren hubungan ini sangat jelas terlihat pada kebuntuan negosiasi nuklir 2003-2008, yang merupakan sebuah konsekuensi masalah yang jauh lebih luas antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan terhadap Republik Islam Iran. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut akan mempengaruhi negosiasi nuklir pada tahun 2003-2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan pendekatan struktural. Sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui tehnik kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : bahwa konfrontasi menyangkut masalah nuklir Republik Islam Iran 2003-2008 merupakan konsekuensi dari hubungan Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Konfrontasi ini dapat berubah menjadi konflik. Yang lebih penting untuk diketahui adalah struktur kebudayaan Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang sedemikian rupa memang mendorong untuk konflik.

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PROGRAM NUKLIR REPUBLIK ISLAM IRAN 2003-2008**

Oleh:

Dio TanBrani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Juruan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PROGRAM NUKLIR REPUBLIK ISLAM
IRAN 2003-2008**

Nama Mahasiswa : **Dio Tan Brani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0913033035

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Wakidi, M.Hum.
NIP 19521216 198603 1 001



Drs. Syaiful, M, M.Si.
NIP 19610703 198503 1 004

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001



Drs. Syaiful, M, M.Si.
NIP 19610703 198503 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Wakidi, M.Hum.**

Wakidi
.....

Sekretaris : **Drs. Syaiful. M, M.Si.**

Syaiful
.....

Penguji : **Drs. Iskandar Syah, M.H.**

Iskandar Syah
.....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Drs. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Desember 2016**

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : Dio TanBrani
2. NPM : 0913033035
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan/ Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP Unila
5. Alamat : Jln. Pangeran Antasari Gang. Sadar II No. 30
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



Bandar Lampung, Desember 2016


Dio TanBrani
NPM. 0913033035

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 1990, anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Rudi Yanto dengan Ibu Suminah. Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Pratama pada tahun 1995.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung, kemudian Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMPK) Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur yang selesai pada tahun 2005, dan kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2009. Tahun 2009, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada Tahun 2011 penulis melaksanakan Kullia Kerja Lapangan (KKL) dan pada tahun 2013 penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Kegiatan Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Ngambur, dan Desa Sumber Agung, Pesisir Barat.

MOTTO

*“Aku tidak bermaksud (dalam urusan ini) kecuali (menghadirkan) perbaikan selama aku berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku kembali”
(Qs. Hud [11]: 88;)*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:
Ayahanda Rudi Yanto dan Ibunda Suminah, Kakanda
Mahmud Cahyadi, Kakanda Yeyen Aryani, Kakanda Lili
Suarni yang telah banyak memberikan dukungan dan
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.. .

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008”. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beserta do’a dari orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas semua yang telah diberikan yaitu kepada:

1. Bapak Dr.Muhammad Fuad, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Wakil Dekan III Drs. Supriyadi, M.Pd. Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs.Zulkarnain, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Syaiful. M, M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Pembimbing II, terimakasih atas dukungan, keikhlasan dalam membimbing dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang Bapak berikan kepada penulis dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.
7. Bapak Drs. Wakidi, M.Hum Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis hingga akhirnya penulis dengan lancar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bapak Drs. Maskun, M.H, Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum, Ibu Dr. Risma Sinaga., M.Hum, Bapak Drs. Tontowi Amsia, M.Si, Bapak Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd, Bapak Suparman Arif., S.Pd, M.Pd, Bapak Chery Saputra, S.Pd., M.Pd dan Bapak Marzius Insani, S.Pd M.Pd, Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd M.Pd dan Myristica Imanita , S.Pd, M.Pd beserta para pendidik di Unila yang telah memberikan ilmu serta wawasan baru kepada penulis.

9. Kedua Saudariku yaitu Aryani S.P dan Lili Suwarni S.P , terima kasih banyak atas kasih sayang, serta kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Monica Candra Sari Puspita Harahap S.Pd, terima kasih banyak atas dukungan, kesabarannya, rasa sayang, serta perhatian yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
11. Sahabat – sahabatku Alm. Adrian Adha, Alm. Zian Ismaya, Panji Satrio, dan Rully Arief Sanjaya, yang telah memberikan banyak pengalaman dalam hidup serta terus mengingatkan akan pentingnya menyelesaikan pendidikan ini.
12. Teman-teman Kuliah Ahmad Arif, Beni Apriantoro, Galih Saputra, Yul Surastyawan, Geri Antono, Sidiq Saputra, Bang Noviandi, terima kasih telah mendukung serta memberi motivasi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga menjadi ladang amal bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

Dio TanBrani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Analisis Masalah.....	8
2.1 Identifikasi Masalah.....	8
2.2 Pembatasan Masalah.....	8
2.3 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
3.1 Tujuan Penelitian.....	9
3.2 Manfaat Penelitian.....	9
I.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.2 Konsep Ideologi Amerika Serikat.....	12
2.1.3 Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat.....	14
2.1.4 Konsep Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran Iran.....	17
2.2 Kerangka Pikir.....	20
2.3.Paradigma.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	24
3.2 Variabel Penelitian.....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.1 Teknik Kepustakaan.....	31
3.2.2 Teknik Dokumentasi.....	31

3.3 Instrumen Penelitian.....	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	33
3.4.1 Reduksi Data.....	35
3.4.2 Penyajian Data.....	35
3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Politik Luar Negeri Amerika Serikat.....	39
4.1.1 Budaya Politik Amerika Serikat.....	39
4.1.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Barat.....	44
4.2 Hubungan Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.....	51
4.2.1 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran 1953-1978.....	51
4.2.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Revolusi Islam 1979....	60
4.3 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Iran	77
4.3.1 Program Nuklir Iran.....	77
4.3.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.....	79

PEMBAHASAN

4.4 Konsekuensi Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Hubungannya dengan Republik Islam Iran.....	97
4.5 Konfrontasi Amerika Serikat mengenai Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.....	103

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.0 Kesimpulan dan Saran.....	112
-------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Pada tahun-tahun belakangan ini, para sarjana semakin menemukan bahwa tradisi-tradisi budaya mempunyai dampak yang kuat pada politik, dan agama merupakan salah satu elemen budaya yang paling kuat dan terus bertahan.

Geertz menggambarkan sebuah budaya bukan sekedar sebagai wadah dari adat-adat, kegunaan-kegunaan, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan, melainkan sebagai *serangkaian mekanisme kontrol* untuk memandu perilaku. Budaya menghamparkan prediktabilitas dan juga memeliharanya, sebuah budaya yang tidak mempunyai ruang bagi yang disebut terakhir ini akan menjadi terlalu statis dan tidak mampu beradaptasi dengan yang materi dan kondisi-kondisi sosial yang berubah. Keyakinan-keyakinan dan kelompok-kelompok keagamaan merupakan pondasi suatu budaya. Pandangan-pandangan dunia keagamaan memberikan makna transendental bagi dunia. Pandangan-pandangan dunia keagamaan terdiri dari nilai-nilai yang menempatkan klaim unik terhadap kebenaran serta merasionalisasi hubungan sosial dan tujuan masyarakat. Geertz mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem simbol yang bertindak untuk menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, universal dan tahan lama pada manusia dengan memformulasikan konsepsi-konsepsi tentang tatanan umum eksistensi dan memberi konsepsi-konsepsi ini suatu aura faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi tersebut tampak sangat realistis (Clifford Geertz, 1973 : 57).

Apa yang diberikan, apa yang ditakuti, dan dibenci oleh suatu bangsa dapat dilihat dalam pandangan-pandangan dunianya, disimbolkan dalam agamanya, dan pada gilirannya diekspresikan dalam seluruh kualitas hidup. Agama-agama memerinci

tindakan apa yang harus diambil, dan keyakinan-keyakinan keagamaan menciptakan kewajiban untuk bertindak.

Tocqueville menyatakan “bahwa agama di Amerika Serikat menopang kebiasaan-kebiasaan baku rakyatnya. Menurutnya budaya politik Amerika memperlihatkan harapan karena kekuasaan yang berdaulat belum menghancurkan lembaga-lembaga mediasi. Yakni struktur sistem politik itu sendiri, asosiasi-asosiasi sukarela, dan agama. Agama bagi Tocqueville merupakan faktor utama untuk mencegah kesetaraan menjadi depotisme. Agama juga merupakan penyeragam dan pemersatu, dimana hukum bersumber dari kedaulatan rakyat, tetapi keadilan bersumber dari kedaulatan umat manusia dan Sang Pencipta. Hukum keadilan yang semakin tinggi merupakan suatu pelindung dari tirani mayoritas (Alexis de Tocqueville, [1835, 1840], 1958 : 70-269).

Penafsiran Tocqueville atas agama dan politik di Amerika Serikat menjadi sebuah cetak biru, sebuah ideologi, yang menempa konsensus saat perubahan besar. Dari para teoritikus besar masih tidak jelas bagaimana agama menjadi suatu kekuatan yang merasionalisasi *status quo*, atau menjadi suatu model untuk perubahan.

Glock (1972) menyatakan bahwa “kuncinya adalah bagaimana orang memandang Tuhan. Ketika imajinasi keagamaan berubah, demikian juga bentuk-bentuk sosial yang bisa diterima dan sebaliknya”. Pandangan-pandangan dunia keagamaan mempunyai akar yang sangat duniawi, dan materi dari teologi dan filsafat politik adalah mirip – alam, takdir, hubungan-hubungan, tatanan, kebebasan (Charles Glock, 1972 :11-15) .

Pendapat ini untuk menyadap citra-citra tentang Tuhan dan citra-citra tentang umat manusia, dan membentuk pandangan-pandangan fundamental orang tentang tatanan sosial. Citra Tuhan sebagai pendamping juga menunjukkan hubungan prediktif yang penting bagi posisi-posisi isu spesifik dan ideologi politik.

Para pemimpin muda koloni-koloni Amerika Utara yang pecah menggunakan suatu bentuk kontraktarianisme yang unik untuk menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Merupakan suatu kewajiban sebuah bangsa untuk memberikan loyalitas kepada pemerintah mereka (kewajiban yang dibebankan oleh Tuhan). Namun, adalah kewajiban penguasa untuk memerintah secara adil (kewajiban yang juga dibebankan Tuhan). Ketika penguasa melanggar kepercayaan tersebut, orang-orang harus memberontak, bukan demi diri mereka, melainkan demi Tuhan (David C. Leeger. Lyman A. Kellstedt, 1993 : 19-20).

Itulah logika Deklarasi Kemerdekaan, dan itu adalah logika yang mendukung pembangkangan sipil dan banyak perang moral dalam sejarah politik Amerika Serikat hingga sekarang. Suatu hukum yang lebih tinggi memberikan tujuan bagi negara. Sebuah negara mendapatkan legitimasinya berkat hukum yang lebih tinggi tersebut. Bangsa Amerika lahir dalam wadah kewajiban agama ((David C. Leeger. Lyman A. Kellstedt, 1993:21).

Bagaimanapun, yang jelas adalah bahwa agama warga dalam budaya politik Amerika Serikat mempunyai fungsi-fungsi *kependetaan* maupun *profetik*. Fungsi kependetaan membuat kebijakan politik Amerika Serikat bermandikan rahmat ilahi dan memobilisasi loyalitas rakyat melalui tujuan-tujuan transenden. Fungsi profetik menugaskan para pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang gagal untuk berjalan sesuai dengan suatu tujuan ilahian bagi bangsa Amerika (Robert. N. Bellah, 1975 : 21).

Wald meringkas berbagai hal baik dan buruk yang ditimbulkan dalam budaya politik Amerika Serikat. Pertama, ia “bisa memuliakan sebuah bangsa dengan memicu naluri-naluri dermawan dan komitmen pada prinsip-prinsip bangsa”. Kedua, ia bisa mengarah pada pemujaan berlebihan terhadap negara. Ketiga, ia bisa menghalangi skeptisme diri yang diperlukan bagi politik demokratis. Dan yang keempat, ia bisa menetapkan standar-standar yang sangat ”kaku dan tidak fliksibel” sehingga kompromi tidak dimungkinkan (Kenneth D. Wald, 1992 : 64-65).

Banyak nilai mendalam lainnya yang jelas terlihat dalam budaya politik Amerika Serikat bisa dianggap religius hanya dalam pengertian bahwa mereka awalnya kontrareligius. Terdapat suatu alasan untuk meragukan bahwa penduduk pertama adalah sangat religius, terlepas dari adanya gereja-gereja di banyak daerah koloni.

Sebaliknya, para pemuka agama tidak akan melancarkan kampanye peralihan agama besar-besaran yang di kenal sebagai Kebangkitan Besar pada tahun 1790-an dan 1830-an. Sejumlah para pemukim ini datang karena kabur dari penjara, mencari kesempatan ekonomi, dan menghindari wajib militer. Namun, mitos utama yang dipegang teguh adalah mitos yang menggabungkan pencarian akan kebebasan agama dengan tujuan dunia baru-bangsa baru.

Ilmu sosial dan ilmu politik Amerika Serikat khususnya, telah sangat dipengaruhi oleh, universitas Jerman sebagai model, interpretasi-interpretasi ekonomi masyarakat, entah itu Madisonian atau Marxis dan gerakan progresif. Model universitas Jerman secara filosofis berakar pada berbagai manifestasi dari Hagelianisme yang dimasukkan ke dalam *Kulturprotestanisme*. Pada masa-masa awal, demikian versi Hegelianisme ini, Roh ilahiah diketahui melalui Kitab Injil dan gereja-gereja. Namun, dalam perkembangan sejarah manusia roh tersebut diwujudkan kedalam intuisi manusia, kecuali mereka yang utamanya bersandar pada akal-budi dan ilmu pengetahuan. Negara, universitas, pengelola pemerintahan, teolog, ilmuan, semuanya membaca dan mengejawantahkan rencana ilahiah tersebut (Charles Glock, 1972 :11-15).

Banyak universitas Amerika Serikat swasta maupun negeri berawal sebagai institusi-institusi sektarian dengan penekanan pada tempat beribadah dan kekuatan moral. Sebagian besar pemimpin dan guru besar mereka adalah “pendeta”. Gagasan ini telah merangsang baik gerakan-gerakan konservatif maupun liberal dalam dekade-dekade belakangan ini. Sering kali mereka di sinkretisasi oleh etos moralis dari wacana politik Amerika Serikat sehingga apa yang secara esensial anti-agama pada awalnya dikuduskan sebagai alasan agama untuk tujuan sekuler.

Budaya politik Amerika Serikat tentang *dosa asal* tertanam dalam pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan terbatas, dan ketidakpercayaan pada politisi-politisi. *Teologi perjanjian* membenarkan tatanan konstitusional untuk memberontak. Rasa sebagai *bangsa yang terpilih* terbukti dalam tujuan nasional, takdir yang nyata, imrealisme ekonomi, dan ekspor demokrasi. Semua itu merupakan gagasan keagamaan yang mempunyai konsekuensi politik (Wald, 1992:45-68).

Wacana politik Amerika Serikat terhadap Iran merupakan agenda dari tujuan-tujuan tersebut, tetapi Iran merupakan isu yang sulit dihadapi sehingga ketelibatan akan membawa dampak yang tidak bisa ditebak dan konsekuensi politik domestik yang ditimbulkannya terlalu besar. Tahun 1953, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Iran modern. Bagi kebanyakan rakyat Iran, bukan hanya mereka yang aktif dalam politik, tahun tersebut menandai awal hubungan Amerika Serikat dan Iran.

Revolusi Konstitusi, Nasionalisasi Minyak dan Kudeta yang terjadi pada 19 Agustus 1953 merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan AS dan Iran, dimana Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai kekuatan dominan di Iran. Proses ini tidaklah mulus atau pun bebas masalah., dan pergesekan yang muncul tidak sepenuhnya berasal dari pihak Iran. Amerika Serikat dengan antusias masuk untuk membangun apa yang dikatakan seorang sejarawan sebagai “ Negara klien “ mereka. Salah satu bagian penting dari negara klien ini adalah pengembangan angkatan bersenjata untuk mempertahankan dan melindungi dinasti dan pada akhirnya melindungi dunia bebas terhadap komunisme (Ali M. Ansari, 2006 : 40-56).

Pada tahapan ini terlihat perkembangan mengenai pertumbuhan kesadaran politik di Iran yang mulai mengubah rakyat Iran. Amerika Serikat hadir di saat kelahiran politik modern Iran, dan akan menjadi tokoh antagonis dalam wacana politik Iran. Hubungan ini diwarnai dengan intensitas kedekatan elite Syah Reza Pahlevi dan kelompok keamanan politik di Amerika Serikat.

Koneksi sosial antara Iran dan AS terutama dalam bentuk pertukaran pelajar, 40.000 warga AS berada di Iran pada 1978, dan sekitar 60.000 mahasiswa Iran berada di AS. Pada tahun 1974, AS menandatangani sebuah kesepakatan 10 tahun dalam pengembangan teknologi nuklir. Laporan Senat ini mencatat bahwa penjualan peralatan militer telah mencapai \$10,4 miliar antara tahun 1972 hingga 1976, sehingga Iran menjadi pembeli tunggal terbesar persenjataan AS, dan menambahkan bahwa 24.000 warga Negara AS yang kini bekerja di Iran dapat meningkat menjadi 50.000 hingga 60.000 jiwa pada 1980 (F. Azimi, 1999 : 334).

Akibat meningkatnya intensitas hubungan serta peningkatan kehadiran warga AS di Iran menimbulkan kekhawatiran tidak hanya rakyat Iran tetapi juga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Histeris politik pada tahap ini akan mempengaruhi Amerika Serikat dengan cara yang lebih intens. Konsekuensi budaya dari interaksi ini terbukti terlalu resiprokal, dan intensitas hubungan tersebut merupakan konsekuensi tidak hanya semakin erat hubungan melainkan perkembangan lebih lanjut di dunia media massa. Dalam tahap ini ketakutan terhadap revolusi dan konsekuensinya mulai terlihat, sebagaimana dikatakan Duta Besar Ramsbotham:

“Ini bukan berarti bahwa kondisi di Iran akan mengambang sebuah situasi revolusi dalam enam tahun ke depan, mungkin ada cukup pengawasan berimbang bagi terciptanya perubahan tertata di bawah Monarki, jika Syah menghadapi masalah peningkatan iteligenzia dengan pikiran terbuka dan ekspresi sosial: dia menyadari hal ini, meski dengan segan, namun dia tidak tahu bagaimana memulainya. Putranya mungkin terlalu kecil untuk menahan tekanan dari bawah, terutama jika perubahan monarki terjadi melalui kekerasan berupa pembunuhan dengan segala kekuatan emosionalnya. Yang ingin saya katakan saat ini hanyalah bahwa bahaya bagi monarki dalam 5-6 tahun lagi mungkin lebih besar daripada bahaya jangka pendek”(Wright to Melhuis, 8 Juni 1972).

Dalam mengontari penilaian ini, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan:

“Semakin lama dia (Syah) menunggu, semakin besar dorongan revolusi yang harus dia bendung, enam tahun dalam dunia modern mungkin kelihatannya lama; tapi kita harus ingat bahwa, pada 1978 nanti, kita akan hampir menyelesaikan pengiriman 800 kapten tentara, plus apa pun senjata canggih yang Syah pesan (mungkin termasuk pabrik senjata dan amunisi). Semua peralatan ini bisa berada di tangan pemerintahan revolusioner”(Wright to Melhuis, 21 Juni 1972).

Revolusi Islam 1979 akan mengikat Iran dan Amerika Serikat dalam sebuah hubungan ideologis yang intim, yang ditentukan oleh pengalaman kolektif

bersama yang traumatis. Ini adalah persinggungan populer dan demokratik, dimana massa kedua belah pihak tidak bersedia dipengaruhi oleh aturan-aturan masyarakat internasional. Amerika Serikat yang kaget ketika digambarkan sebagai “Setan Besar” berusaha mengendalikan konsekuensi-konsekuensi revolusi. Namun ketidakmampuannya dalam menghadapi Revolusi secara konstruktif mengakibatkan penggunaan cara dan metode yang tidak sesuai.

Transformasi hubungan ini memberi Iran inisiatif dengan membiarkan para politikus Iran menentukan metodologi interaksi. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di Amerika Serikat merasa Iran tidak dapat dipahami, hal ini terutama dikarenakan mereka harus bermain dalam sebuah lingkungan yang didefinisikan oleh lawan mereka. Implikasi yang tidak kalah mengejutkan adalah penemuan kembali semangat dan misi revolusioner Amerika Serikat. Konsekuensinya kedua belah pihak yang didorong oleh media massa memastikan bahwa masing-masing mempertahankan mitologi revolusi masing-masing.

“Selama Khatami berkuasa dan masa bakti Majelis ke-6 belum berakhir, Amerika tidak akan mengambil tindakan militer terhadap Iran, karena Amerika akan menghadapi masalah dari dunia maupun opini publik. Namun melihat hasil pemilihan dewan lokal terkini, mereka mengantisipasi bahwa pemilihan berikutnya (Pemilihan Majelis dan Presiden) akan menunjukkan hasil yang sama dengan pemilihan dewan. Dan berdasar premis tersebut, Amerika Serikat menyiapkan dasar untuk segala aksi terhadap Iran (Emadim Baqi, *Jurnal Reformis*, Juni 2003).

Perubahan-perubahan dalam generalisasi keamanan politik di kedua negara setelah revolusi membawa dampak pada masalah nuklir terkini. Banjir literatur dan komentar tiba-tiba menyangkut masalah nuklir Iran 2003-2008 merupakan konsekuensi, bukan penyebabnya.

I.2 Analisis Masalah

2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kebudayaan Politik Amerika Serikat yang memiliki kesamaan dengan Budaya Politik Republik Islam Iran sehingga mempengaruhi hubungan kedua negara.
2. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran yang bersifat konfrontatif.
3. Ketidakmampuan para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi isu dengan Republik Islam Iran.
4. Permasalahan hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang mengakibatkan kebuntuan terhadap negosiasi program nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.

2.2 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, mengingat keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.

2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sajakah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan terhadap Iran ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konsekuensi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap hubungannya dengan Republik Islam Iran, dan dampaknya terhadap negosiasi nuklir Republik Islam Iran tahun 2003-2008.

3.2 Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Diharapkan menambah pengetahuan mengenai bagaimana struktur budaya politik Amerika Serikat dan Republik Islam Iran dapat mempengaruhi hubungan luar negeri kedua negara.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negosiasi nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.
3. Serta diharapkan dapat mengerti mengapa masalah nuklir Republik Islam Iran pada tahun 2003-2008 tidak dapat mencapai kesepakatan yang jelas.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.
2. Subjek Penelitian : Kebijakan Politik Luar Negeri.
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Umum, Perpustakaan Daerah.
4. Waktu Penelitian : Tahun 2014-2015
5. Temporal : Tahun 2003-2008
6. Bidang Ilmu : Sejarah Kontemporer, Sejarah Ilmu Sosial, Sosial Politik, Hubungan Internasional.

REFERENSI

- Ali M. Ansari. 2006. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Alexis D. Tocqville. [1835, 1840], 1958. *Democracy in America*. Terj. Phillips Bradley. New York: Vintages Books. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Bellah, Robert N. 1975. *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial*. New York : Seabury. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- F. Azimi. 1999. *The Crisis of Democracy: Iran*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Glock, Charles Y. 1972. *Images of God, Images Of Man, and the Organization of Social Life. Journal for Scientific Study of Religions*. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Kenneth D. Wald. 1992. *Religions and Politics in the United States*. Edisi Kedua. Washington, DC: Congressional Quarterly Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA DAN HIPOTESIS

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori-teori atau konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial untuk mendukung pengkajian secara struktural. Sehingga kita dapat melihat suatu permasalahan merupakan sebuah letupan dari struktur masyarakat.

2.1.2 Konsep Ideologi Amerika Serikat

Seorang ahli sosilog, Glock, mengidentifikasi ideologi sebagai berikut :

Ideologi menurut Glock, adalah hal yang paling signifikan ketika terjadi perubahan sosial. Ideologi adalah visi suatu gambaran verbal tentang masyarakat yang baik dan sarana-sarana utama untuk mencapainya. Ideologi tidak memihak *status quo*, ia adalah instrumen perubahan (Glock, 1972 : 1-15).

Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan

budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya.

Pendekatan terhadap ideology di Amerika Serikat ditemukan pada 1800-an. Ia menjadikan penerapan yang sadar atas agama yang ada untuk mendorong kemajuannya. Dapat dilihat dalam *Democracy in America* karya Alexis de Tocqueville :

Tocqueville menyatakan “bahwa agama di Amerika Serikat menopang kebiasaan-kebiasaan baku rakyatnya. Menurutnya budaya politik Amerika memperlihatkan harapan karena kekuasaan yang berdaulat belum menghancurkan lembaga-lembaga mediasi. Yakni struktur system politik itu sendiri, asosiasi-asosiasi sukarela, dan agama. Agama bagi Tocqueville merupakan faktor utama untuk mencegah kesetaraan menjadi depotisme. Agama juga merupakan penyeragam dan pemersatu, dimana hukum bersumber dari kedaulatan rakyat, tetapi keadilan bersumber dari kedaulatan umat manusia dan Sang Pencipta. Hukum keadilan yang semakin tinggi merupakan suatu pelindung dari tirani mayoritas (Alexis de Tocqueville, [1835, 1840], 1958 : 70-269).

Pandangan ini diteliti lebih dalam oleh Welch dan Leege (1988) membedakan kegunaan dari pencitraan keagamaan, gaya pemujaan, perasaan dekat dengan Tuhan, dan keyakinan-keyakinan agama yang mendasar sebagai alat prediksi bagi sikap dan perilaku politik. Mereka menemukan bahwa :

“Citra Tuhan sebagai hakim lebih kuat dan terbukti sebagai alat prediksi yang kuat dalam berbagai spektrum isu politik. Ia merupakan tanda yang bermanfaat bagi ideology politik. Citra Tuhan sebagai pendamping juga menunjukkan hubungan prediktif bagi isu-isu spesifik dan ideology politik. Etos Amerika membuat asumsi-asumsi kultural yang melibatkan imajinasi keagamaan atau pandangan-pandangan keagamaan. Menentukan beberapa nilai fundamental, seperti individualisme, egatarianisme, libetarianisme, teloransi terhadap plularisme, dan konflik, percaya pada ilmu pengetahuan dan rasionalisme, gagasan tentang kemajuan, kebobrokan atau kesempurnaan manusia, rasa kasih terhadap yang memerlukan, atau preferensi-preferensi akan pemecahan-pemecahan non-pemerintah (Michael R. Welch dan David C. Leege, 1988 : 52).

Genre ini sebenarnya hanya terbatas pada sikap terhadap dasar-dasar budaya kapitalisme dan demokrasi yang menjadi ciri khas dalam budaya politik Amerika Serikat, dimana budaya Amerika Serikat hanya bisa dianggap sebagai *religiøs* hanya dalam pengertian bahwa mereka awalnya kontrareligius.

Dalam budaya politik Amerika Serikat misalnya, gagasan tentang dosa asal atau kebobrokan manusia tertanam dalam pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan, dan ketidakpercayaan kepada politisi-politisi. Teologi perjanjian membenarkan tatanan konstitusional dan hak untuk memberontak. Rasa sebagai bangsa yang terpilih terbukti dalam tujuan nasional, takdir yang nyata, imperialisme ekonomi, dan ekspor demokrasi. Semua itu merupakan gagasan keagamaan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik (Wald D. Kenneth, 1992 : Congressional Quarterly Press).

Dengan demikian yang dimaksud bahwa sebagian dari gagasan-gagasan diatas telah merangsang gerakan-gerakan konservatif maupun liberal dalam dekade-dekade belakangan ini. Sering kali mereka disinkretisasi oleh etos moralis dari wacana politik Amerika Serikat sehingga apa yang secara esensial anti-agama pada awalnya dikuduskan sebagai alasan agama bagi tujuan sekuler. Sulit untuk memisahkan apa yang merupakan tujuan spiritual dan politik, di Amerika Serikat agama dan politik menjadi dua sisi mata uang dan dengan mudah tumpah kebagian lain, apa pun kata Konstitusi.

2.1.3 Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Kebijakan Politik Luar Negeri menurut Breuning :

“merupakan jalan untuk mengerti perilaku suatu negara terhadap negara lain ataupun lingkungan internasional. Ketika kebijakan luar negeri ini digunakan untuk mengetahui perilaku, maka disinilah dapat dikatakan kebijakan luar negeri sebagai subjek pembelajaran. Bahwasanya kebijakan

luar negeri ini mempunyai bentuk-bentuk yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga ketika kebijakan luar negeri ini mempunyai pola-pola yang tetap maka kebijakan luar negeri dapat dijadikan sebuah disiplin ilmu tersendiri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai *subject of study* (Breuning, Marijke (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan. Ch.1).

Negara-negara yang paling penting dalam politik dunia adalah Negara-negara berkekuatan besar (*great powers*). Hubungan Internasional dipahami oleh kaum realis terutama sebagai perjuangan di antara negara-negara berkekuatan besar untuk dominasi dan keamanan. Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau :

“Konsep kepentingan (*interest*) yang dikonseptualisasi ke dalam istilah “*power*” antara nalar (*reason*) yang berusaha memahami politik internasional dengan fakta - fakta yang merupakan arah memilah-milah antara fakta- fakta politik dan bukan fakta politik, arah mana akan memberikan suatu tertib sistematis terhadap lingkup politik, yang sekaligus pula akan menempatkan politik sebagai lingkup kegiatan dan pemahaman yang otonom. Artinya, lingkup ini akan membedakan lingkup kegiatan lainnya. Konseptualisasi kepentingan (*interest*) dalam formulasi “*power*” dimanifestasikan ke dalam tataran politik internasional, mendasari pemikiran teori realisme politik akan memberikan kerangka bangunan teoretis terhadap politik luar negeri (Hans J. Morgenthau, 2008: 52).

Menurut Barry Buzan politik luar negeri merupakan konsekuensi dari hubungan internasional yang muncul akibat *security dilemma* (*dilemma keamanan*) :

“lensa keamanan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atas kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap bermusuhan . Intinya adalah untuk keamanan nasional, yang merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan internasional. Dimensi keamanan tersebut mempunyai titik-titik vocal dalam kerangka masalah-masalah keamanan, dan merumuskan cara-cara sendiri dalam menentukan prioritas utama kebijakan politik luar negeri suatu negara (Barry Buzan dan L Hansen, 2009: 26).

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi politik luar negeri Amerika Serikat yang kini lebih bersifat global selalu menggunakan politik “*double standard*” . Berikut merupakan penjelasannya :

“Dengan jargon kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, Barat akan menjatuhkan kecaman bahkan sanksi-sanksi jika ada salah satu belahan dunia yang sengaja dan berani melanggarnya serta melecehkan kedudukannya. Lain halnya bila yang terjadi di belahan negeri yang lain, interaksi yang dilakukan menggunakan standar yang lain. Apa yang haram di Barat tidak lagi haram di Timur dan sebaiknya mereka dengan memakai asas pragmatism. Ajaran pragmatism telah sering kali mengakibatkan penghalalan apa yang haram di Barat dan tidak diwajibkan apa yang wajib di Barat (Yusuf Al-Qaradhawi, 2000 :8-9).

Ini merupakan kelanjutan dari misi imperialisme dan kolonialisme masa lalu, konsep globalisasi, politik, ekonomi, budaya yang saat ini didengungkan Amerika Serikat merupakan kekuatan untuk mendominasi dunia internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan Wiliam Blum, dengan mengatakan :

“Para pemimpin Amerika telah meyakinkan mayoritas rakyat Amerika akan kebaikan dari kebijakan politik luar negeri pemerintahan mereka. Juga sebagian besar manusia di seluruh dunia, namun dihadapan begitu banyak bukti yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang tentunya merupakan peringkat teratas dari segala keberhasilan propaganda dan indoktrinasi sepanjang sejarah. Berbagai bentuk intelijen dunia, dengan kecerdasan politik yang saya definisikan sebagai kemampuan untuk melihat secara cermat segala omong kosong yang diberikan oleh para politisi yang didengungkan media kepada seluruh masyarakat yang dicekakkan kepada warganya sejak lahir untuk memastikan keberlanjutan dari ideologi yang berkuasa (Willian Blum, 2013: 12).

Melalui pendapat diatas kita dapat melihat bahwa kepentingan nasiona lAmerika Serikat merupakan motif utama dari kebijakan politik luar negeri yang merupakan konsekuensi dari perubahan masyarakat dunia internasional. Ekspor serta perang agar dunia aman bagi demokrasi, imprealisme ekonomi,dan kebebasan merupakan

hal-hal yang sakral dalam budaya politik Amerika Serikat. Sehingga semua hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dijalankan dalam dunia internasional. Kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat dapat dilihat dalam kerangka dasar yang disebut sebagai konsekuensi dari keyakinan-keyakinan-keyakinan individu yang terkait dengan kebudayaannya.

2.1.4 Konsep Kebijakan Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran

Untuk menghargai sistem politik dalam negeri Republik Islam Iran, kita perlu menelaah bagaimana visi awal Ayatullah Khomeini mengenai *Wilayattul Faqih* (Pemimpin Ulama yang ahli Hukum) dalam politik sehari-hari. Menurut Ayatullah Montazeri seorang salah satu penyusun rancangan UU yang asli :

“Otoritas tertinggi dimaksudkan untuk diberikan kepada pengawal religius, sehingga para politikus akan terus diingatkan mengenai pentingnya spiritualitas dan etika. Hakim Agung tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalankan kekuasaan harian. Pemegang posisi tersebut ditunjukkan untuk menegahi dan memandu, sebuah peran yang tidak terlalu berbeda dari peran monarki tradisonal, yang fungsinya adalah mengelola system dan memulihkan keseimbangan jika perlu (BBC SWB ME/1968 MED/17, 2000 : 11 Oktober).

Ini merupakan percobaan untuk menyediakan lembaga politik modern dengan konteks Islam yang akan memberi makna bagi rakyat Iran. Wilayatul Faqih adalah sebuah usaha untuk memberi landasan mitis bagi kegiatan praktis Parlemen, dan menampung yang modern dalam sebuah visi tradisonal. Setelah Revolusi Islam, Iran menurut Karen Amstrong :

“Kebutuhan negara tampaknya mendorong orang Iran kearah pluralisme yang lebih besar dan ke arah sekularisasi berdasarkan tradisi *Syiah* bukan Barat. Rakyat menjadi tidak memusuhi nilai-nilai modern seperti sebelumnya, karena mereka dapat mendekati nilai tersebut dalam lingkungan Islami. Popularitas Revolusi Islam menyarankan bahwa Iran

sedang bergerak menuju tahap pascarivolusi yang akan membawa lebih dekat dengan Barat (Karen Armstrong, 2006 : 501-502).

Penekanan pandangan di atas dapat kita lihat dalam karya Abdolkarim Soroush, yang merupakan salah seorang intelektual Iran :

Pada akhir abad kedua puluh, banyak orang Iran memiliki tiga jadi diri: pra-Islam, Islam, dan Barat, yang harus mereka usahakan untuk didamaikan. Tidak semua yang di Barat itu mencemarkan dan beracun, rasionalisme ilmiah tidak mungkin menyediakan alternatif yang dapat dijalankan bagi agama. Umat manusia akan senantiasa membutuhkan kerohanian yang membawa mereka melampaui yang materi. Orang Iran perlu menghargai nilai-nilai ilmu modern, sembari mempertahankan tradisi-tradisi Syiah mereka. Islam pun harus berubah, fiqh harus menyesuaikan dengan dunia industri modern, mengembangkan filsafat hak-hak sipil dan teori ekonomi yang mampu mempertahankan diri untuk dipercayakan hanya kepada agamawan (Mehzard Boruherdi, 1996 : 25-31).

Pandangan Bapak Pendiri Republik Islam Ayatullah Khomeini berikutnya menyangkut fungsi dan kekuasaan negara adalah :

“sistem dasar Islam, dengan sistem sosial, ekonomi perburuhan, masalah perkotaan, pertanian, atau jenis apa pun lainnya, dan dapat menjadikan jasa pelayanan yang merupakan monopoli Negara menjadi alat penerapan kebijakan umum dan menyeluruh. Pemerintah diberi kekuasaan untuk secara sepihak membatalkan setiap perjanjian yang sah, bila perjanjian itu melanggar kepentingan Islam dan negara. Pemerintah dapat mencegah masalah apa pun, entah agama atau sekuler, bila masalah itu bertentangan dengan kepentingan Islam (Daniel Brumberg, 1997 : 35).

Salah satu kepentingan dalam pemerintahan Iran ialah pasokan listrik. Hal ini yang mendorong Republik Islam Iran terus melanjutkan “Program Nuklir” yang merupakan kepentingan nasionalnya, namun hal ini pula yang menjadi permasalahan yang dimulai sejak tahun 1959, dengan pembelian reaktor untuk riset dari Amerika Serikat :

Program nuklir Iran mendapatkan momentum ketika pada tahun 1973 *Stanford Research Institute* yang berbasis di Amerika Serikat memprediksikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan energinya, Iran perlu mengembangkan sumber energi alternatif berbasis non-minyak. Dan menyarankan pembangunan fasilitas nuklir yang mampu menyalurkan 20.000 megawatt listrik sebelum tahun 1994 (<http://nsarchive.chadwyck.com>).

Setelah revolusi tahun 1979, semua kegiatan nuklir dihentikan dan baru dimulai lagi setelah perang Iran-Irak selesai. Setelah Revolusi Islam Iran 1979, Amerika Serikat berhenti memasok uranium untuk rezim yang baru, namun pengembangan nuklir di Republik Islam Iran terus berjalan dari tahun 1980-an hingga 2005.

Pada tahun 1984 bekerjasama dengan Argentina, 1985-1991 bekerjasama dengan China melalui sebuah perjanjian bilateral dalam hal kerjasama pengembangan teknologi nuklir Iran. Pada 1989, Presiden Republik Islam Iran menjadi Negara Pihak pada Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 1992 (George Allen & Unwin, 1982:84).

Menurut sumber yang didapat, alasan utama pengembangan teknologi di Iran adalah sebagai berikut :

Alasan utama dari program nuklir Iran adalah sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Angka pertumbuhan permintaan akan ketersediaan listrik di Iran meningkat sebanyak 5% sampai 8%/tahun, sehingga pada tahun 2010, diprediksikan Iran akan membutuhkan tambahan pasokan listrik sebesar 7000 Megawatt. Jumlah tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dari minyak dan gas saja, mengingat Iran adalah negara yang sebagian pendapatan negaranya berasal dari ekspor minyak dan gas. Disamping itu angka indikator konsumsi minyak Iran semenjak tahun 1990 menunjukkan peningkatan drastis mencapai 8% per-tahun, dan total konsumsi energi meningkat sebesar 280% (Mousavi, Mohammad Ali dan Yasser Norouzi, 2010: 121).

Faktor lain adalah pertumbuhan populasi dan dinamika sosial masyarakat Iran. Semenjak Revolusi Islam 1979, populasi Iran bertumbuh dengan pesat lebih dari dua kali lipat menjadi 70 juta jiwa. Sedangkan produksi

minyak hanya mampu mencapai 70%. Kondisi ini diperburuk karena sejak tahun 1979 hingga 1997 Iran dikenakan embargo oleh Amerika Serikat yang menjadikan Iran tidak memiliki investasi berarti yang masuk ke Iran, terutama industri minyaknya (Mousavi, Mohammad Ali dan Yasser Norouzi, 2010: 152).

Berikut tujuan penerapan dikembangkannya teknologi nuklir damai Republik

Islam Iran :

1. Pembangkit tenaga listrik.
2. Bidang sumber daya pertanian, pembasmi hama tanaman.
3. Bidang peternakan.
4. Bidang oceanography.
5. Teknologi kedokteran.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bahwa program nuklir Republik Islam Iran merupakan salah satu dari kebijakan politik dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik, dikarenakan populasi Iran terus meningkat. Disamping itu program nuklir juga merupakan energy alternatif yang dapat diperbaharui, dapat digunakan untuk kebutuhan medis, peternakan dan pertanian.

2.2 KERANGKA PIKIR

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan manusia yang merupakan bagian dari hubungan sosial yang menjurus pada konflik atau kerja sama. Sebelum tindakan-tindakan ini dilakukan, politik luar negeri merupakan rencana, gagasan, doktrin, sistem prinsip, nilai-nilai, dan anjuran-anjuran atau dapat kita

simpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri sangat erat hubungannya dengan budaya.

Tindakan individual biasanya dikembalikan kepada motivasi. Motivasi sangat ditentukan oleh nilai-nilai atau norma-norma, yang keduanya merupakan faktor cultural yang berfungsi sebagai prinsip atau dasar hidup yang melandasi kelakuan aktual. Ternyata kelakuan individual senantiasa berpedoman pada orientasi nilai. Terwujud sebagai kepercayaan, ajaran agama, dan ideology pada umumnya.

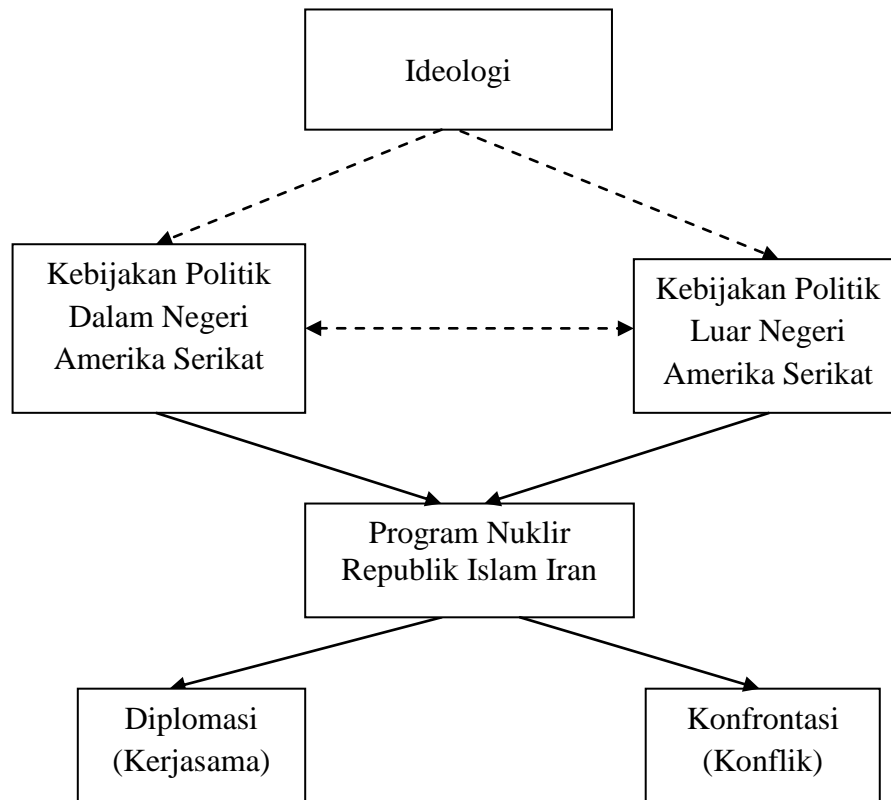
Salah satu elemen budaya yang paling kuat dan terus bertahan sampai hari ini adalah agama, ia merupakan fondasi suatu budaya yang memberikan makna transendental bagi dunia. Terdiri dari nilai-nilai yang menempatkan klaim unik terhadap kebenaran serta merasionalisasi hubungan sosial dan tujuan masyarakat.

Para teoritikus sosial memperlakukan agama sebagai sumber stabilitas politik, keyakinan-keyakinan keagamaan ini akan mengatur mekanisme-mekanisme kontrol sosial seperti sanksi, kompensasi, dan ideologi. Ia akan memberikan loyalitas yang mendalam terhadap negara, memberikan aspirasi tertinggi dari sebuah bangsa, memiliki visi dan tujuan bagi masyarakat yang baik serta sarana untuk mencapainya. Dan demikian keyakinan-keyakinan yang melekat pada pandangan-pandangan dunia keagamaan memiliki akar yang sangat duniawi, dan materi dari teologi dan filsafat politik adalah mirip menyangkut tatanan, hubungan-hubungan, takdir, alam dan kebebasan.

Organisasi keagamaan sangat terlibat dalam sosialisasi awal pada masyarakat Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang terus berjalan hingga kini, dan memberikan kontribusi pada perilaku warga terhadap negara. Kesamaan budaya

ini menandai adanya sebuah hubungan politik yang lebih langsung. Sehingga dalam hal politiklah kita dapat menentukan bagaimana apa saja kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran

2.3 Paradigma



Keterangan :

a.-----> Garis Pengaruh

b.-----> Garis Tujuan

REFERENSI

- BBC SWB ME/1968 MED/17, 2000 : 11 Oktober. Dalam Ali M. Ansari.
Supermasi Iran. Jakarta: Zahra.
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*.
New York: Palgrave MacMillan. Ch.1
- David, Tracy. 1975. *Blessed Rage for Order, The Analogical Imagination:
Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York:Crossroad.
Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam
Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam
Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Glock, Charles Y. 1972. *Images of God, Images Of Man, and the Organization of
Social Life. Journal for Scientific Study of Religions*. Dalam David C.
Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*.
Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- H.J. Morgenthau. 2008. *Teori Realisme Politik*. Dalam J.D. Soresen Pengantar
Hubungan Internasional. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.M. Labib. 2007.
Kronologi Krisis Program Nuklir Iran. Dalam Sejarah Antar Bangsa.
Jakarta. Mizan Pustaka.
- Karen Amstrong. 2001 *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam,
Yahudi, Kristen*. Bandung. Mizan Pustaka Anggota IKAPI.
- Kenneth D. Wald. 1992. *Religion and Politics in the United States*. Washington
DC. Congressional Quarterly Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A.
Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute
dan Yayasan Obor.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, peneliti akan memberitahukan metode penelitian apa yang akan penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian tersebut. Sehingga, konsep dan teori yang menjadi landasan analisis peneliti dalam membahas isu terkait akan lebih mudah dipahami.

3.1 Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian, metode merupakan faktor yang penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan penelitian. Di dalam penelitian ini, metode merupakan faktor penting untuk memecahkan masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut Winarno Sukarhman, metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu (Winarno Sukarhman, 1982:121).

Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo melihat permasalahan atau pemilihan metode merupakan :

Sebagai permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah dapat disebut masalah pendekatan. Penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diperhatikan. Hasil penukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai (Sartono Kartodirjo, 1993:24).

Menurut Sartono Kartodirjo implikasi metodologi cara memandang gejala historis secara naratif tidak memadai karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan beserta berbagai perspektif yang inheren dalam berbagai bidangnya dan menuntut adanya pendekatan serta meminjam alat-alat analitis dari ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik (Sartono Kartodirjo, 1993:3-4).

Proses politik sebagai kompleksitas hubungan antar pemimpin dan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilisasi, solidaritas dan loyalitas, dan lain sebagainya, kesemuanya akan mampu mengungkapkan pola distribusi pengaruh dan kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi komunitas (*economy*) serta dengan *society* sendiri (hubungan sosial). Semuanya itu didasarkan atas *culture* (nilai-nilai) (Sartono Kartodirjo, 1993: 9).

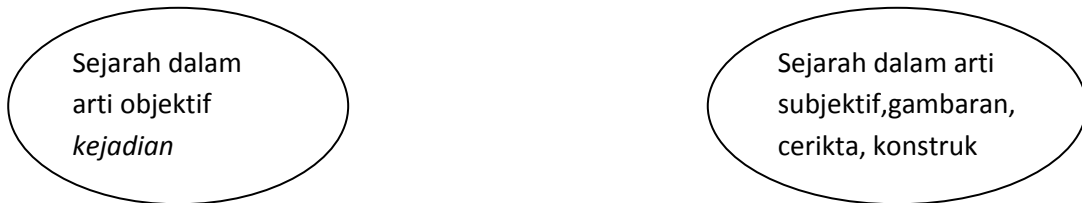
Selain itu para ahli mengatakan bahwa :

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001:79).

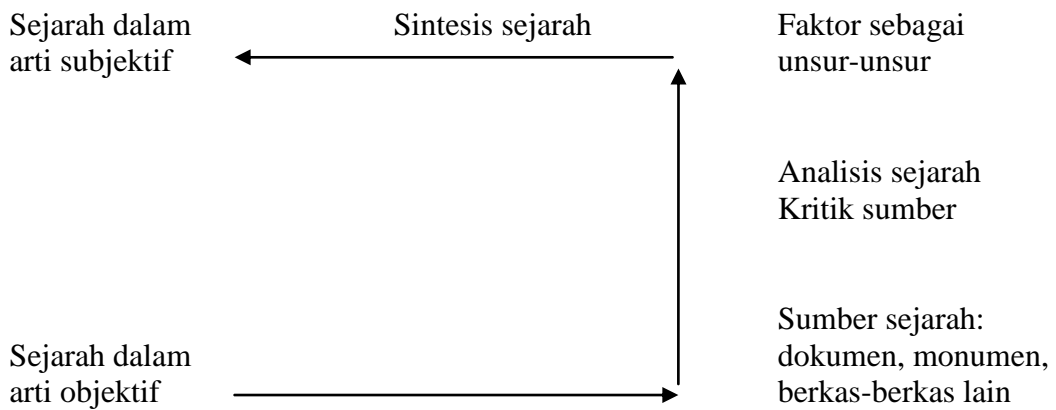
Metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan yang akan datang (Mohammad Nazir, 1988:56).

Berdasarkan pendapat di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, penelitian ini mengambil subjek dari peristiwa-peristiwa sejarah yang menurut Sartono Kartodirjo sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian dan kesatuan itu merupakan suatu unit yang mencakup fakta-fakta

terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses maupun struktur (Sartono Kartodirjo, 1993:14). Skema gambar dibawah merupakan penjelasan untuk menerangkan sejarah dalam arti subjektif.



“Proses Rekontruksi Sejarah”



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian historis adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data, fakta, atau dokumen yang disusun secara sistematis, dari evaluasi yang subjektif dari data data yang berhubungan dengan masalah-masalah masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan baik masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Tujuan dari Penelitian Historis dalam tulisan ini adalah untuk membuat rekontruksi masa lampau secara sistematis dan subjektif dengan cara menyeleksi

mana yang relevan dengan pokok penelitiannya, kemudian menyediakannya lewat pengolahan sebagai fakta-fakta. Hasil kritik-kritik sumber ialah fakta-fakta yang merupakan unsure-unsur bagi penyusunan rekonstruksi sejarah (Sartono Kartodirjo, 1993:16).

Untuk mencapai hasil sintetis diatas diperlukan suatu kerangka pikiran atau referensi yang mewadahi atau mencakup semua fakta yang tidak lagi dipersatukan sebagai agregasi, tetapi telah tersusun sebagai kesatuan seperti direncanakan. Pembuatan sintetis akan dipermudah oleh alat-alat analitis, konsep-konsep, dan teori-teori. Selanjutnya, akibat dan dampak peristiwa tersebut perlu pula diungkapkan tindak lanjut pihak-pihak yang mengalami peristiwa, yang dicakup dalam lingkup (*scope*) waktu (*temporal*) dan ruang (*spatial*) sehingga tegaslah garis-garis perbatasan peristiwa itu (Sartono Kartodirjo, 1993:18).

Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam penulisan ini penulis melihat sejarah sebagai sebuah konstruk yang tidak dimaksud untuk menggambarkan sejarah sebagai potret, tetapi lebih seperti lukisan. Tercermin pada lukisan itu cara pelukis melihat objek, tehnik penggarapannya, pandangannya, dan gayanya. Dalam penulisan sejarah juga tercakup pandangan, pendekatan, metode, dan gaya bahasa penulis. Penulis juga terikat pada fakta-fakta dalam cerita bagaimana sebenarnya cerita itu terjadi. Untuk merangkai fakta-fakta sebagai suatu cerita diperlukan kemampuan berfikir logis dan memiliki imajinasi.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu :

1. Heuristik, adalah usaha menemukan dokumen-dokumen yang merupakan suatu *art* atau seni, dalam arti bahwa kecuali perlu ditaati peraturannya, alat-alat kerjanya, juga dibutuhkan keterampilan. Di samping itu, tetap merupakan kenyataan bahwa tersedianya bahan, baru tampak bila seorang penulis tertarik pada suatu permasalahan yang menarik. Penulis tidak hanya berkewajiban

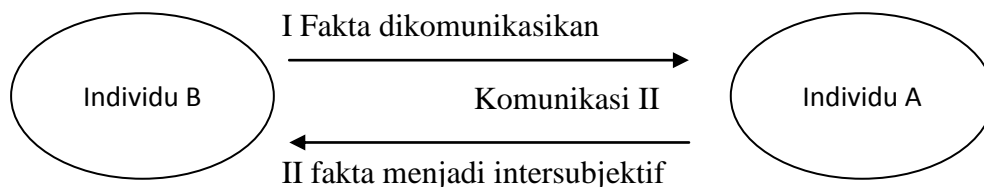
menemukan dokumen apa, di mana, dan bagaimana, tetapi yang lebih penting ialah dokumen *yang mana*.

2. Kritik, Pemakaian dokumen sebagai sumber sejarah memerlukan kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern meneliti apakah dokumen itu autentik, yaitu kenyataan identitasnya; jadi, bukan tiruan atau palsu. Setelah identitasnya terbukti asli, baru diteliti isinya, apakah isi pernyataan, fakta-fakta, dan ceritanya dapat dipercaya. Untuk itu perlu diidentifikasi penulisnya, jauh dekatnya dari peristiwa, singkatnya apakah pernyataannya dapat diandalkan.
3. Interpretasi, pada penulisan ini ialah berpendapat bahwa sejarah dalam arti objektif tidak mungkin dialami kembali, akan tetapi bekas-bekasnya sebagai memori dapat diaktualisasikan. Bentuk pengungkapan kembali ialah pernyataan (*statement*) tentang kejadian itu. Dengan demikian jelaslah bahwa fakta sebenarnya telah merupakan produk dari proses mental (sejawaran) atau memorisasi. Oleh karena itu pada hakikatnya fakta juga bersifat subjektif, memuat unsur dari subjek. Fakta adalah hasil dari konstruksi subjek, terdiri dari fakta “lunak” yaitu jangka lama belum mantap dan fakta “keras” yaitu yang tersimpan dalam dokumen-dokumen.
4. Historiografi, merupakan kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian, dalam hal ini penulis membuat laporan hasil penelitian berupa penulisan skripsi dari apa yang didapatkan penulis saat Heuristik, Kritik, dan Interpretasi. Bahwa pengumpulan dokumen dalam penulisan ini tidak dapat dilakukan secara tuntas dalam arti sebenarnya (Sartono Kartodirjo, 1993:30-31-32).

3.2 Variabel Penelitian

Menurut pendapat Mohammad Nazir, Variabel dalam arti sederhana adalah suatu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Mohammad Nazir, 1988:149). Kemudian menurut pendapat Sumandi Suryabrata bahwa variable sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sedangkan variable penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumardi Suryabrata, 2000: 72).

Sedangkan dalam variabel penelitian ini menggunakan konsep dari ilmu-ilmu sosial yang bertolak dari suatu sejarah atau konstruk sebagai sejarah dalam arti subjektif, bahwa fakta sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif. Komunikasi yang luas akan membuat fakta semakin intersubjektif, artinya dimiliki oleh banyak subjek.



Apabila suatu fakta secara intersubjektif telah diterima sebagai kebenaran, maka bagi yang menerimanya fakta tersebut dapat di “keluarkan” dari subjek secara individual; jadi diobjektifitaskan menjadi suatu objek. Dengan demikian fakta tersebut dapat diterima oleh kelompok yang bersangkutan sebagai objektif (Sartono Kartodirjo, 1993: 66). Dimana fakta dapat dibedakan dari nilai-nilai yang dipegang oleh suatu bangsa/Negara tertentu, yang akan berpengaruh terhadap tindakan dan motivasi pelaku.

Untuk menghindari ketersepihakan atau pandangan determinitis perlu dipergunakan pendekatan multidimensional, yaitu melihat berbagai segi atau aspeknya. Dengan demikian dapat diungkapkan berbagai dimensi suatu peristiwa, ialah ekonomis, sosial, politik, dan kultural.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud variabel penelitian ini adalah sebuah objek yang telah melewati proses “pengolahan” dalam pikiran seorang subjek dimana seluruh kesadarannya “terendam” dalam suatu kultur dalam segala aspeknya yang menjadi pusat perhatian dalam penulisan ini (Sartono Kartodirjo, 1993: 65). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel multidimensional dengan fokus penelitian pada struktur hubungan budaya Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang akan mempengaruhi negosiasi nuklir tahun 2003-2008.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data ini diartikan sebagai metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data-data atau sumber-sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tema penelitian, dengan demikian peneliti perlu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan sumber-sumber bahan antara lain melalui :

3.2.1 Teknik Kepustakaan

Menurut pendapat Joko Subagyo yang dimaksud dengan teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko

Subagyo, 2006: 109). Pendapat S. Nasution menyatakan bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, pamphlet dan bahan dokumenter lainnya yang bertalian dengan penelitian (S. Nasution, 1996: 145).

Menurut Koentjaraningrat studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya Koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997: 133).

Dapat disimpulkan bahwa teknik kepustakaan ini adalah cara penulis untuk mengumpulkan fakta-fakta di dalam sebuah data-data informasi serta dokumen-dokumen untuk penelitian historis yang ilmiah.

3.2.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut Sumardi Suryabrata yaitu, secara besar sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya' (Sumardi Suryabrata, 1983 : 18).

Teknik dokumentasi menurut Muhammad Ali, bahwa dokumentasi adalah "sumber informasi dokumenter pada dasarnya segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi dalam bentuk laporan, statistik, surat resmi, buku harian dan macam-macamnya baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan (Muhammad Ali, 1985 : 41).

Melalui pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teknik kepustakaan dan dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan informasi berupa fakta-fakta sejarah, agar dapat digeneralisasikan melalui konsep yang dapat ditemukan melalui buku-buku teks dan dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi dan yang diterbitkan maupun tidak oleh para ilmunan.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah untuk mencapai generalisasi dalam penulisan ilmiah yang menunjukkan sebuah keteraturan dalam penulisan agar dapat menarik kesimpulan umum serta khusus. Dalam penelitian ini selain penulis, terdapat pula pengarang yang menjadi instrumen dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi terlebih dahulu, yakni berupa pemahaman metode penelitian historis dengan menggambarkan sejarah sebagai sebuah konstruk.

Selain itu melakukan kritik terhadap dokumen serta identitas pengarang, apakah pernyataan pengarang tersebut dapat diandalkan. Setelah identitasnya terbukti asli, baru diteliti isinya, apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya, serta jauh dekatnya dari peristiwa dalam waktu dan lain sebagainya. Hasil dari uji kelayakan penulis serta pengarang menciptakan fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan dan rekonstruksi cerita sejarah.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena data yang diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis. Kecermatan dalam memilih teknik analisis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Setelah data penelitian diperoleh maka langkah peneliti selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data untuk diintegrasikan dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

Setelah data diverifikasi, fakta-fakta dikumpulkan, serta objektivitas diolah, kemudian dianalisa menggunakan perspektif “struktural”, yang dimaksudkan dengan perspektif struktural ialah:

Proses sosial sebagai gejala kelakuan manusia yang berinteraksi menunjukkan pola atau struktur tertentu sehingga dapat digeneralisasikan, meski tidak dapat dirumuskan sebagai hukum. Proses yang terwujud dari kelakuan atau tindakan dapat diuraikan atas unsur-unsur psikologis, seperti persepsi, reaksi kognitif, evaluasi, motivasi, aksi dan seterusnya. Proses psikologis yang kompleks itu mencakup faktor sosial dan kultural, seperti golongan sosial, nilai-nilai, orientasi pandangan, dan sebagainya (Sartono Kartodirjo, 1993: 110).

Artinya suatu deskripsi, dari suatu peristiwa menunjukkan fakta-fakta yang tersusun sebagai urutan dan mewujudkan sebuah gerakan. Lihat Gambar:

$$f_1 \dots f_2 \dots f_3 \dots f_4 \dots f_{n-1} \dots f_n.$$

Dinamika mata rantai fakta-fakta perlu dituangkan sebagai cerita sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses; dengan perkataan lain, peristiwa dipaparkan segi prosesualnya. Apabila dalam pelukisan itu tampil suatu keteraturan atau pola

dari kelakuan atau tindakan pelaku, maka struktur orang itu dapat diekstrapolasikan (Sartono Kartodirjo, 1993: 110).

Adapun kerangka referensi melalui perspektif struktural sebagai berikut :

1. Struktur sosial yang mencakup berbagai golongan sosial atau kelas sosial serta hubungan-hubungannya.
2. Struktur kekuasaan yang mencerminkan hierarki dalam system politik.
3. Struktur kepribadian (*personality*) yang terwujud pada pola kelakuan dan sikap seseorang sebagai pengendapan sifat, watak, dan nilai-nilai yang dihayati oleh pribadi tersebut.
4. Struktur organisasi senantiasa tampil sebagai jaringan hubungan antara para anggota dengan pengurus.

Sejarah struktural mengungkapkan aspek struktural dari kejadian-kejadian, dan pada umumnya mau tidak mau sejarah struktural menjadi sejarah analisis, meski tidak semua sejarah analisis tidak dengan sendirinya sejarah struktural. Untuk mengekstrapolasikan “struktur” bacaan dokumen atau pengamatan gejala, kita memerlukan peralatan analitis yang terdiri atas konsep-konsep dan teori dari ilmu-ilmu sosial, seperti politik, sosiologi, antropologi dan lainnya (Sartono Kartodirjo, 1993: 111).

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa

data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut (H.B. Sutopo, 2006:113).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam deskriptif analitis dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dimana struktural lazimnya mencakup jangka waktu panjang, yaitu mencakup perubahan struktur masyarakat. Merupakan proses menyeluruh dan mencakup berbagai dimensi yaitu: politik, ekonomi, sosial, kultural dan lainnya. Dalam hal ini kompleksitas proses perubahan sosial dapat dianalisis, antara lain bagaimana suatu generalisasi pada satu tingkat makro mempunyai dampaknya di tingkat *mezzo* atau mikro, dan sebaliknya bagaimana kejadian-kejadian pada tingkat mikro merupakan “letupan” atau indikator pada tingkat makro (Sartono Kartodirjo, 1993: 116).

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua fakta-fakta yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kokohnya, sehingga

akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaannya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 1993:113).

Menarik kesimpulan atau verifikasi fakta-fakta objektif harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya yang merupakan validitasnya. Setiap kegiatan analisis dimulai dari pengumpulan data yang merupakan fakta-fakta yang diobjektifkan, reduksi data, penyajian data dengan perspektif struktural yang mengamati proses perubahan sosial secara terstruktur. Pada tahap ini fakta-fakta tersusun sebagai urutan dan mewujudkan sebuah gerakan. Sehingga dapat disimpulkan perspektif struktural hubungan politik luar negeri Amerika Serikat dan Republik Islam Iran adalah:

1. Dimensi sosial tampil pada fakta bahwa mereka saling berhubungan secara verbal atau behavioral.
2. Dimensi budaya tampil pada kenyataan bahwa ada aturan dari hubungan ini yang harus ditaati, jadi, ada nilai tertentu yang mendasari hubungan ini.
3. Dimensi politik diperlihatkan sewaktu seorang muncul sebagai pemimpin dan mengatur kelompok.
4. Dengan demikian, pelbagai aspek struktural dari kelakuan pemimpin dalam kelompok dapat ditampilkan, terwujud sebagai pola, atau bentuk kelakuan tertentu.
5. Serta terlihat pula aspek struktural dalam cara pembagian peran, urutan giliran bertindak, jangkauan interaksi, ruang gerak, dan lain sebagainya

REFERENSI

- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 2001. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gajah Mada Press
- H.B Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teroi dan Praktik*. Jakarta. RINEKA CIPTA.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Sartono Kartodirjo.1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI.
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metode Penelitian*. PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Winarno Sukarman. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tersito: Bandung.
- .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Politik Luar Negeri Amerika Serikat

4.1.1 Budaya Politik Amerika Serikat

Ideologi, struktur politik, kebudayaan dan ekonomi merupakan alat yang digunakan penulis untuk mengetahui sebuah kebijakan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Pertama ialah terhadap ideologi yang ditemukan di Amerika Serikat pada 1800-an *Democracy in America* karya Alexis de Tocqueville (1835,1840,1958) Tocqueville dipandang bukan hanya sebagai ilmuwan sosial besar oleh para pendidik Amerika Serikat, malainkan juga sebagai dokumen sumber, baik bagi mitos-mitos pendirian maupun bagi pembentukan identitas nasional.:

Tocqueville menyatakan “bahwa agama di Amerika Serikat menopang kebiasaan-kebiasaan baku rakyatnya. Agama tidak akan pernah bergabung dengan negara, tidak pernah menjadi dominan secara politik melalui kelompok-kelompok keagamaan tunggal, dan tidak pernah merasionalisasi gerakan-gerakan politik yang bisa mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran (Alexis de Toqueville, [1835, 1840], 1958 :).

Ia menjadikan penerapan yang sadar atas agama yang ada untuk mengukur kemajuannya. Penafsirannya atas agama dan politik di Amerika Serikat menjadi sebuah cetak biru, sebuah ideologi, yang menempa konsesus pada saat perubahan besar. Meski ideologi programatik ini sempat kehilangan kekuatan selama masa

urbanisasi dan industrialisasi, tetapi secara berkala mulai diperbaiki ketika bangsa Amerika mencari jiwa nasionalnya.

Struktur-struktur keagamaan lokal mirip dengan banyak titik akses dan penyebaran kekuasaan dalam sistem politik di Amerika. Agama juga penting dalam politik Amerika, karena jika semua politik bersifat lokal, jelas banyak agama bersifat lokal (David C. Legee, 1993 : 5-6).

Dari karya para teoritikus sosial besar, masih tidak jelas bagaimana agama menjadi suatu kekuatan yang merasionalisasi *status quo* atau suatu model untuk perubahan, menurut Glock adalah :

Glock (1972) menyatakan bahwa “kuncinya adalah bagaimana orang memandang Tuhan. Ketika imajinasi keagamaan berubah, demikian juga bentuk-bentuk sosial yang bisa diterima dan sebaliknya” (Charles Glock, 1972 :11-15) .

Greeley mengembangkan argumen ini dengan mengatakan bahwa hal ini dapat membentuk suatu pandangan-dunia keagamaan yang paradokmatis, yakni suatu pandangan yang mendahului dan mengesampingkan konsep-konsep teologis substantif, dan membentuk pandangan-pandangan kita dalam merespons peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial, dan politik yang baru (Andrew M. Greeley, 1981 : 28).

Pandangan-pandangan tentang citra-citra Tuhan dan umat manusia merupakan metafora keagamaan baik sekuler maupun religius, dan membentuk pandangan fundamental tentang tatanan sosial. Singkatnya pencitraan keagamaan mempunyai hubungan yang erat, baik dengan orientasi politik-filosofis maupun dengan perasaan-perasaan menyangkut isu-isu politik tertentu.

Ilmu sosial dan ilmu politik Amerika Serikat khususnya, telah sangat dipengaruhi oleh, universitas Jerman sebagai model, interpretasi-interpretasi ekonomi masyarakat, entah itu Madisonian atau Marxis dan gerakan progresif. Model universitas Jerman secara filosofis berakar pada berbagai manifestasi dari Hagelianisme yang dimasukkan ke dalam *Kulturprotestanisme* (Charles Glock, 1972 :11-15) .

Menurut ahli sosiolog Masden, Longfield, dan Bradley dalam studinya tentang budaya politik Amerika Serikat bahwa :

Pada masa-masa awal, demikian versi Hegelianisme ini, Roh ilahiah diketahui melalui Kitab Injil dan gereja-gereja. Namun, dalam perkembangan sejarah manusia roh tersebut diwujudkan kedalam intuisi manusia, kecuali mereka yang utamanya bersandar pada akal-budi dan ilmu pengetahuan. Negara, universitas, pengelola pemerintahan, teolog, ilmuan, semuanya membaca dan mengejawantahkan rencana ilahiah tersebut. Bagaimanapun, dalam semangat deisme dan transendentalisme, mereka bisa berubah. Masih melayani Roh Tuhan melalui proses belajar yang sakral, tetapi sekuler (Marsden, Longfield dan Bradley 1992 1-35).

Banyak universitas Amerika Serikat swasta maupun negeri berawal sebagai institusi-institusi sektarian dengan penekanan pada tempat beribadah dan kekuatan moral. Sebagian besar pemimpin dan guru besar mereka adalah “pendeta”.

Dalam budaya politik Amerika Serikat misalnya, gagasan tentang dosa asal atau kebobrokan manusia tertanam dalam pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan, dan ketidakpercayaan kepada politisi-politisi. Teologi perjanjian membenarkan tatanan konstitusional dan hak untuk memberontak. Rasa sebagai bangsa yang terpilih terbukti dalam tujuan nasional, takdir yang nyata, imperialisme ekonomi, dan ekspor demokrasi. Semua itu merupakan gagasan keagamaan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik (Wald D. Kenneth, 1992 : Congressional Quarterly Press).

Bagaimanapun, banyak nilai mendalam lainnya yang jelas terlihat dalam budaya politik Amerika Serikat bisa dianggap religius hanya dalam pengertian bahwa mereka awalnya kontrareligius. Terdapat suatu alasan untuk meragukan bahwa penduduk pertama adalah sangat religius, terlepas dari adanya gereja-gereja di banyak daerah koloni. Sebaliknya, para pemuka agama tidak akan melancarkan kampanye peralihan agama besar-besaran yang di kenal sebagai Kebangkitan Besar pada tahun 1790-an dan 1830-an.

Dalam studinya untuk mengetahui budaya politik Amerika Serikat David C Leege dan Lyman menjelaskan tentang sebuah kekuatan untuk merasionalisasi status quo yaitu :

Ketika para pemimpin muda koloni-koloni Amerika Utara yang pecah menggunakan suatu bentuk kontraktarianisme yang unik untuk menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Merupakan suatu kewajiban sebuah bangsa untuk memberikan loyalitas kepada pemerintah mereka (kewajiban yang dibebankan oleh Tuhan). Namun, adalah kewajiban penguasa untuk memerintah secara adil (kewajiban yang juga dibebankan Tuhan). Ketika penguasa melanggar kepercayaan tersebut, orang-orang harus memberontak, bukan demi diri mereka, melainkan demi Tuhan. Itulah logika Deklarasi Kemerdekaan (David C. Leege. Lyman A. Kellstedt, 1993 : 19-20).

Sejumlah para pemukim ini datang karena kabur dari penjara, mencari kesempatan ekonomi, dan menghindari wajib militer. Namun, mitos utama yang dipegang teguh adalah mitos yang menggabungkan pencarian akan kebebasan agama dengan tujuan dunia baru-bangsa baru. Berasal dari masa pencerahan, tujuan mereka adalah mendobrak ikatan kuat dari nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh pandangan-pandangan dunia dan intuisi-intuisi keagamaan.

Bagaimanapun, organisasi keagamaan sangat terlibat dalam sosialisasi awal pada masyarakat Amerika yang terus berjalan hingga kini, proses-proses yang menghasilkan dan memelihara kesadaran bersama. Agama diperlakukan oleh para teoritikus sosial sebagai sumber stabilitas politik. Bahwa semua organisasi sosial melibatkan bentuk-bentuk hierarkis. Keyakinan-keyakinan keagamaan secara khas digunakan untuk menjamin ketidakadilan hierarkis. Dengan tidak adanya paksaan dan tanpa pembenaran supranatural, orang tidak akan menyetujui ketidakadilan tersebut (David C. Leege, 1993 : 12).

Maka mengabaikan pengaruh-pengaruh agama dan politik sebenarnya merupakan suatu keputusan yang berakar pada penilaian tentang agama suku etnis dan

takhayul primitif. Meskipun demikian, Keyakinan Protestan *garis-utama* sangat tertanam dalam “budaya yang mendalam” dari ilmu sosial pada zaman itu.

Dalam suatu kelompok keagamaan yang merupakan serangkaian lembaga keagamaan, terutama gereja lokal dan misionaris yang terkait, badan-badan pendidikan dan administratif, yang secara formal berkaitan satu sama lain, dan memiliki seperangkat keyakinan, praktik, dan komitmen bersama. *Denominasionalisme* adalah salah satu ciri unik masyarakat Amerika Serikat, dan kelompok-kelompok keagamaan memainkan peran utama dalam kehidupan orang Amerika Serikat (Roof, Wade Clark dan Mc Kinney, William. 1987, 76-78).

Bahasa liberal yang tertanam kuat dalam budaya politik Amerika digunakan oleh para politisi partai Republik dan aktivis evangelis untuk memobilisasi pemilih, bukan menyangkut masalah aborsi, melainkan menyangkut isu yang berkaitan dengan sekolah, humanisme sekuler, dan sebagainya. Singkatnya, politik di Amerika Serikat saat ini melibatkan berbagai hubungan simbolis antara para elite dan pemilih, tidak hanya menyangkut isu-isu ekonomi, tetapi juga menyangkut isu-isu yang menghubungkan pandangan-pandangan dunia keagamaan dan mobilisasi gereja (David C. Leege, 1993 : 12).

Memberikan banyak kepercayaan terhadap agama dalam interpretasi-interpretasi politik dianggap membahayakan struktur masyarakat. Agama tampak memecah belah manusia. Politisi-politisi populis di Amerika Serikat punya andil atas kebodohan rakyat melalui penggunaan metafor-metafor keagamaan dalam kampanye-kampanye mereka. Sebuah bangsa yang sangat beragama, sangat heterogen, dapat dipecah belah dengan sangat mendalam oleh agama (David C. Leege. Lyman A. Kellstedt, 1993 : 10).

Elite-elite politik AS kontemporer mengembangkan tema kampanye dan menggunakan citra keagamaan untuk membangun koalisi yang, sebagian, didasarkan pada seruan-seruan keagamaan. Sebagian gagasan ini telah merangsang baik gerakan-gerakan konservatif maupun liberal dalam dekade-dekade belakangan ini.

Sering kali mereka di sinkretisasi oleh etos moralis dari wacana politik Amerika Serikat sehingga apa yang secara esensial anti-agama pada awalnya dikuduskan sebagai alasan agama untuk tujuan sekuler.

Bagaimanapun, yang jelas adalah bahwa agama warga dalam budaya politik Amerika Serikat mempunyai fungsi-fungsi *kependetaan* maupun *profetik*. Fungsi kependetaan membuat kebijakan politik Amerika Serikat bermandikan rahmat ilahi dan memobilisasi loyalitas rakyat melalui tujuan-tujuan transenden. Fungsi profetik menugaskan para pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang gagal untuk berjalan sesuai dengan suatu tujuan ilahian bagi bangsa Amerika (Robert. N. Bellah, 1975 : 21).

Wald meringkas berbagai hal baik dan buruk yang ditimbulkan dalam budaya politik Amerika Serikat. Pertama, ia “bisa memuliakan sebuah bangsa dengan memicu naluri-naluri dermawan dan komitmen pada prinsip-prinsip bangsa”. Kedua, ia bisa mengarah pada pemujaan berlebihan terhadap negara. Ketiga, ia bisa menghalangi skeptisme diri yang diperlukan bagi politik demokratis. Dan yang keempat, ia bisa menetapkan standar-standar yang sangat ”kaku dan tidak fliksibel” sehingga kompromi tidak dimungkinkan (Kenneth D. Wald, 1992 : 64-65).

Sekali lagi, politik dan agama dalam budaya politik Amerika Serikat seperti dua sisi mata koin dimana satu sisi sangat mudah tumpah ke sisi yang lain. Memerlihatkan dirinya dalam takdir yang terejawantah, dalam emansipasi, dalam beban orang kulit putih, dan bentuk-bentuk lain dari imperialisme keagamaan dan ekonomi, dalam perang untuk membuat dunia aman bagi demokrasi, dalam PBB, dan banyak perang moral dalam sejarah politik Amerika Serikat hingga sekarang.

Suatu hukum yang lebih tinggi memberikan tujuan bagi negara. Sebuah negara mendapatkan legitimsinya berkat hukum yang lebih tinggi tersebut. Bangsa Amerika lahir dalam wadah kewajiban agama. Tetapi, warganya mungkin merupakan orang-orang bebal yang saleh, yang di tipu oleh penguasa yang memanipulasi suatu agama warga.

4.1.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Barat

Kebijakan politik Amerika Serikat di Asia Barat khususnya setelah Perang Dunia II, merupakan sebuah fenomena politik baru dalam politik global yakni kerjasama dan intergrasi negara dalam suatu kawasan dalam skala kontinental.

Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (David Held. 2000, *Regulation Globalization, international sociology*, 394).

Setelah Perang Dunia II berakhir banyak perubahan yang terjadi dari setiap bangsa/negara, terutama dalam hal kekuasaan politik serta penyebaran pengaruh terhadap suatu kawasan. Asia Barat merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak, kawasan ini juga dikenal dengan kawasan yang paling bermasalah di dunia. Konflik sektetarian, upaya perdamaian, serta keinginan Amerika Serikat untuk mendominasi dunia mulai terlihat. Tidak selalu mulus pastinya, dan kita akan melihat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Barat khususnya yang berkaitan dengan Iran.

Sebuah laporan di *Times* pada 1961 melemparkan penilaian berikut mengenai bantuan AS kepada Iran selama dasawarsa sebelumnya :

“Angka-angka statistik layak dipertimbangkan. Sejak 1952, atau sesaat sebelumnya, bantuan dan pinjaman Amerika dalam beberapa bentuk kepada Iran telah mencapai sekitar \$1.135 juta.... Dari jumlah itu, sekita \$631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan \$504 juta untuk bantuan militer. Semua bantuan militer dan lebih dari setengah bantuan ekonomi berupa hibah, sehingga yang berbentuk pinjaman itu belum dimulai sama sekali.”(FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961).

Bantuan seperti ini mudah diterima Syah, dengan memainkan ketakutan AS terhadap komunisme dan terutama mengenai peran strategis Iran di kawasan dalam menghadapi ancaman Soviet. Sehingga AS memenuhi keinginan Syah untuk memperbarui angkatan bersenjata demi keamanan. Tetapi, semua peralatan serta teknologi yang diberikan jatuh pada kelompok revolusioner di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini.

Revolusi Islam dan krisis penyanderaan yang mengikutinya menjadi peristiwa yang mencapai masyarakat umum. Ini akan menjadi isu dengan makna penting langsung secara domestik dan semakin penting lagi karena kehadiran rakyat biasa Iran dan Amerika Serikat di masing-masing negara.

Konflik Irak – Iran pada September 1980 dimana Amerika Serikat menyatakan sikap netral dalam konflik tersebut, walaupun lebih condong dalam membantu Irak. Bertambahnya dukungan Amerika Serikat terhadap Saddam Hussein sepanjang perang, yang dipertegas oleh kedatangan Donald Rumsfeld ke Irak dan pemulihan hubungan diplomatik secara resmi pada 1984.

AS menyediakan bantuan bagi Irak dalam sejumlah cara, termasuk akses ke sumber daya ekonomi, dukungan dalam forum internasional terkait, dan yang paling signifikan adalah pencitraan satelit seketika yang menggambarkan pergerakan pasukan Iran, sebuah hak istimewa yang hingga sekarang hanya diberikan kepada Israel. Dan yang paling signifikan adalah kebijakan menutup mata atas pengembangan senjata biologis dan kimia yang dilakukan Irak, yang kemudian diujicobakan terhadap tentara Iran (James A. Bill, 1988 : 306).

Iran marah terhadap keterlibatan AS dalam penggunaan peralatan yang kini digambarkan sebagai senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein.

Ketidakpercayaan Iran terhadap Barat khususnya AS yang ditimbulkan kejadian ini luar biasa besar dan terangkat ke permukaan.

AS secara terbuka mengutuk rezim baru, yang tidak memiliki hubungan formal dengan AS, dan terus menerapkan sanksi. Sebagian sanksi, seperti sanksi yang diterapkan Eropa, membatasi aliran senjata ke Iran dan Irak (walau pada praktiknya pembatasan penjualan senjata ke Irak bersifat lebih fleksibel). AS secara aktif berhubungan dengan oposisi Iran, terutama kaum monarki dan putra mendiang Syah yang pada waktu itu menjadi penduduk AS. Amerika Serikat juga menyerang pertumbuhan fundamentalis Islam di Iran, namun terus mendukung kaum fundamentalis Islam di Afghanistan yang menentang Soviet, dan mengumumkan perang melawan terorisme (Ali M. Ansari, 2006 : 121-122).

Sikap seperti ini membuat mereka semakin dekat dengan Israel, yang seperti Amerika Serikat telah kehilangan sekutu regional berharga akibat Revolusi Islam. Pada 1983 terjadi serangan bom bunuh diri di kedubes dan barak militer Amerika Serikat di Beirut. Serangan ini meruntuhkan kepercayaan diri AS di kawasan itu dan menghasilkan penarikan mundur pasukan penjaga keamanan AS dari Libanon. Peristiwa ini menandai krisis kebijakan luar negeri pertama pemerintahan Reagan.

Sebagaimana halnya dengan krisis semacam ini, menyalahkan pihak lain merupakan pilihan politik yang lebih mudah. Ini juga menandai munculnya tren dalam penilaian kebijakan luar negeri AS, di mana ada ambiguitas, perimbangan konsesus menyimpulkan bahwa Iran pasti bertanggung jawab.

Serangan terhadap Kedubes AS dan barak militer di Libanon dianggap serangan nonsipil yang sah sebagai akibat dari apa yang kemudian digambarkan pemerintah AS sebagai misi rahasia, yang membuat pasukan AS ikut campur atas nama Angkatan Darat Libanon, yang secara umum pada waktu itu dianggap sebagai salah satu dari banyak faksi yang berebut kendali atas Libanon (The Times, 1980 : Defence and Foreign Affairs).

AS bersikeras untuk terus menyalahkan Iran, tapi kenyataannya Iran terlibat dalam pertempuran dengan Irak, yang pada waktu itu menikmati hubungan lebih produktif dengan AS. Konsekuensi serius dari dukungan internasional dan AS kepada Irak ini datang seiring dengan Perang Tanker. Saat semua serangan ini memuncak, Kuwait meminta perlindungan asing, hasilnya Amerika Serikat menempatkan kapal-kapal Kuwait dalam perlindungan mereka dan memasuki Teluk Persia Iran dan terlibat dalam konfrontasi langsung.

Salah satu kapal yang di kirim untuk berpatroli ke Teluk bagian utara, USS Stark, menjadi sasaran misil udara-ke-darat Irak yang mengakibatkan kematian 37 tentara Angkatan Laut AS. Atas tragedi ini, Presiden Reagan menyalahkan Iran yang digambarkannya sebagai barbar dan musuh yang sesungguhnya (James A. Bill, 1988 : 307).

Kapal yang bertempur selanjutnya adalah USS Vincennes, dengan panik menambakkan rudal dan meledakkan sebuah pesawat terbang sipil Iran Air yang menewaskan 290 orang. Peristiwa ini bukan saja sebuah tragedi melainkan juga sebuah aib besar bagi pemerintah AS.

Yang mengejutkan dari insiden ini bukanlah kelalaian kriminal yang menyebabkan peristiwa ini melainkan aksi menutupi kesalahan yang mengikutinya, terutama keputusan Presiden Ronald Reagan untuk menghadiahkan sang kapten dengan medali atas keberhasilan menjalankan tugas. Bahkan rakyat Iran yang tidak setuju dengan Republik Islam Iran pun memandang ini sebagai sebuah sinyal aneh dan menyinggung. Peristiwa ini, serta peristiwa yang menyelimuti UUS Strak, meyakinkan kaum skeptis di Iran bahwa AS adalah Setan Besar. Pemerintah AS kemudian menawarkan kompensasi yang setara dengan standar hidup, meski mereka menolak bertanggung jawab (BBC SWB ME/1968 MED/17, 11 Oktober 2000).

Salah satu dampak dari penembakan tragis terhadap pesawat Airbus Iran adalah bahwa Ayatullah Khomeini memutuskan untuk menerima resolusi gencatan

senjata yang didesakkan kepadanya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama delapan tahun.

Politik jaringan pipa yang dikembangkan sepanjang tahun 1990-an, dan sebuah studi kasus yang tepat mengenai bagaimana kepentingan nasional AS diciptakan dan dinyatakan dalam tampilan budaya serta pandangan historis.

Jika Anda ingin mendapat dukungan dan bantuan AS, menunjukkan kecenderungan budaya Persia merupakan sebuah tindakan yang salah secara politis. Konsekuensinya, negara-negara baru pecahan Uni Soviet yang ingin mendapat bantuan AS berbuat sebaik mungkin untuk menutupi hubungan budaya ini. Yang membuat mulut para pengamat Iran ternganga bukannya penyangkalan terhadap segala asosiasi budaya dengan Iran, melainkan penyalahgunaan budaya dan sejarah tersebut sedemikian rupa sampai-sampai Tamerlane menjadi Usbek, Partians menjadi Turkmen, dan festival Tahun Baru Persia yaitu Now Ruz menjadi sebuah kontribusi Turki (Ali M. Ansari, 2006 : 163).

Dalam hal religius, negara-negara baru tersebut mayoritas rakyatnya Sunni, yang merupakan sebuah pembeda penting dengan Iran yang Syiah, walaupun rakyat Iran dengan sangat cepat melepaskan apa yang tidak sesuai dengan ambisi imperial mereka, dan dalam ini sekulerisasi politik Iran belum sepenuhnya dihargai,

Presiden Bill Clinton yang memenangkan pemilu dengan mengusung kebijakan dalam negeri dengan tujuan memanfaatkan kemenangan AS dalam Perang Dingin. Politik dalam negeri akan menjadi prioritas AS. Bencana di Somalia, dimana mayat tentara AS diseret melewati kota di Mogadishu mendorong perkembangan diri terhadap kebijakan politik luar negeri AS.

Keputusan ini juga memperlihatkan kekurangan dan ketidakpengalaman pemerintahan Clinton dalam manajemen kebijakan politik luar negeri.

Dari sudut pandang Timur Tengah, masa bakti pertama Clinton didominasi oleh prioritas Israel, dalam sebuah pergeseran kebijakan kualitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bush, dan terutama Menteri Luar Negeri James Baker, dikenal dengan pendekatan imarsial mereka terhadap konflik Arab-Israel, yang dilambangkan dengan kecaman verbal Baker terhadap pemerintah Israel dalam sebuah sesi dengar pendapat Kongres (Ali M. Ansari, 2006 : 159).

Pemerintahan baru Partai Demokrat ingin memperkuat kembali posisinya sebagai teman alami Israel dengan kebijakan Timur Tengah yang didominasi oleh kepentingan Israel.

Proses perdamaian yang berkembang ini menghasilkan sebuah reorganisasi intelektual di mana lawan tradisional Israel, yaitu negara-negara Arab di sekitarnya, kini harus diakomodasi dalam sebuah bingkai rasa hormat dan potensi kerja sama. Adalah penting untuk membingkai gambaran ini dalam suatu kemasan, sehingga tiba-tiba ditemukan bahwa Arab dan Yahudi sama-sama Semit. Dalam hal hubungan internasional hal ini ditentukan oleh hubungan inti-pinggir di mana Israel mentransfer permusuhannya dengan negara-negara tetangga dari inti ke pinggir, dengan kata lain, ke Iran (Ali M. Ansari, 2006 : 180).

Ini merupakan sebuah upaya ceroboh untuk memberi legitimasi teoritis bagi keharusan politik ini tidak sepenuhnya akan berhasil. Persistiwa 11 September merupakan sesuatu yang membuat Amerika Serikat sangat terkejut, dan pelakunya adalah sekutu AS sendiri, yakni Mesir dan Arab Saudi.

AS, didukung penuh oleh komunitas internasional dan PBB, berniat membalas Taliban di Afghanistan. Amerika Serikat membutuhkan Iran, dan Iran sebaiknya bersikap bermurah hati untuk membantu. Rangkaian peristiwa yang terjadi secara efektif berfungsi, setidaknya pada tataran regional dan partikultural, menyeimbangkan kondisi hubungan antara Iran dan AS (M. Hajizadeh, 2002 : 143-146).

Perang ini (Irak) adalah proyek liberal, revolusioner, dan pembentukan demokrasi yang paling penting bagi Amerika Serikat sejak Marshall Plan.... ini adalah hal yang paling mulia yang pernah dilakukan negara ini di luar negeri (Thomas Friedman, peneliti hubungan internasional dari *New York Times*, November 2003).

Kebijakan AS soal Irak di akhir 2002 memutuskan untuk membalas serangan tersebut dengan menginvasi Afghanistan. Dan yang terjadi adalah Afghanistan dan kemudian Irak diduduki, masalahnya kini adalah penyelesaian ini lebih terfokus pada kekuatan fisik. Pada Februari 2008 sekitar 4000 tentara Amerika Serikat tewas akibat perang tersebut dan jutaan rakyat Irak, dimana George W. Bush mengatakan :

Ketika kita mengangkat hati kepada Tuhan, kita setara di mata-Nya. Kita sama-sama berharga. Dalam doa, kita tumbuh dalam pengampunan dan kasih. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan untuk mencintai tetangga kita seperti kita mencintai diri kita, kita memasuki persahabatan yang lebih dalam dengan sesama manusia (*National Prayer Breakfast*, Washington, D.C, 7 Februari 2008).

4.2 Hubungan Amerika Serikat dan Republik Islam Iran

4.2.1 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran 1953-1978

Pada masalah yang akan dijelaskan ini, penekanan lebih ada pada masalah teknis, dan kondisi yang berubah karena Amerika Serikat semakin mengambil peran yang dahulu dimainkan Inggris. Namun, dalam bidang politik di Iran, AS merupakan terget sekunder, dan, di kalangan kebanyakan, pada tahap ini masih dipandang secara baik. Sampai pada

Efek perkembangan pengaruh AS di Iran setelah 1953 diperkuat oleh berbagai perkembangan dalam kehidupan politik, terutama perkembangan pendidikan dan

teknologi serta berbagai realitas Perang Dingin, yang memberi persaingan AS-Soviet sebuah intensitas dan totalitas yang tidak ditemukan dalam “*Great Game*” yang mewarnai persaingan Anglo-Rusia.

Krisis nasionalisasi minyak ini ditempatkan dalam sebuah bingkai dengan berbagai prioritas berbeda bagi kelompok protagonis utama. Inti dari agenda baru ini adalah dua pertimbangan yang berbeda namun saling terkait, proteksi atas berbagai aset komersial Barat di seluruh dunia dan ketakutan terhadap komunisme. Ironisnya, ketakutan yang ditimbulkan ideologi ini menimbulkan lingkaran setan.

“Pada 1953, CIA, dan rekannya di Britania SIS(yang juga dikenal sebagai M16), sibuk membangun mengoordinasikan sebuah rencana untuk memperlemah dan pada akhirnya menggulingkan Mosaddeq. Berbagai dokumen baru-baru ini meski tidak lengkap yang terungkap berkat Freedom of Information Act (UU Kebebasan Informasi) di AS menunjukkan betapa menyeluruhnya rencana itu. Setiap aspek kudeta, mulai dari penciptaan lingkungan yang menguntungkan hingga detail operasi, disiapkan setahun sebelum dilaksanakan. Sebagian besar dari rencana itu bergantung pada determinasi Syah dalam memenuhi perannya, dan seberapa besar dorongan yang dibutuhkan untuk membuatnya mulai bergerak. Pada akhirnya, CIA yang bertanggung jawab, Kermit Roosevelt, harus secara pribadi mengirimkan fatwa pencopotan Mosaddeq ke Syah untuk ditandatangani. Meski segala persiapan telah dilakukan upaya pertama untuk mengirim fatwa tersebut dihadang oleh unit militer yang setia kepada pemerintah. Saat menerima fatwa tersebut, Mosaddeq secara tidak diduga menurut, dengan menyatakan bahwa dia akan mengikuti apa yang akan diperintahkan. Saat sang Syah pergi ke Roma untuk “liburan”, secara umum tertangkap kesan bahwa kudeta telah gagal. Dalam sebuah pengambilalihan inisiatif yang dramatis, para agen lokal, tanpa bantuan Whitehall ataupun Washington, memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Mosaddeq pun digulingkan dan Syah kembali ke negaranya. Menurut Roosevelt, kata-kata pertama yang diucapkan Syah adalah, “ Saya berhutang atas tahta ini kepada Tuhan, rakyat saya, tentara saya, dan Anda.” Namun Roosevelt menyakinkan Syah bahwa dia tidak berhutang apa pun kepada Amerika maupun Britania. “Ucapan terima kasih secara singkat akan diterima dengan tangan terbuka, tapi tidak ada hutang ataupun kewajiban apa pun. Kami melakukan apa yang telah kami lakukan demi kepentingan bersama. Hasil ini sudah menjadi bayarannya.” (Kermit Roosevelt, 1979 : 199-200).

Oleh sebab itu, Amerika Serikat untuk ikut serta dalam Operasi Ajax, sebuah kudeta yang dirancang oleh intelejien Inggris dan CIA untuk menjatuhkan Musaddiq. Kudeta yang terjadi pada 19 Agustus 1953 menandai sebuah awal hubungan AS-Iran, dan sebagian besar peristiwa yang mendahuluinya diabaikan dan dilupakan.

Setelah peristiwa 1953 AS menjadi kekuatan dominan di Iran, dengan antusias AS masuk untuk membangun “negara klien” mereka. Sebuah laporan di *Times* pada 1961 melemparkan penilaian berikut mengenai bantuan AS kepada Iran selama dasawarsa sebelumnya :

“Angka-angka statistik layak dipertimbangkan. Sejak 1952, atau sesaat sebelumnya, bantuan dan pinjaman Amerika dalam beberapa bentuk kepada Iran telah mencapai sekitar \$1.135 juta.... Dari jumlah itu, sekita \$631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan \$504 juta untuk bantuan militer. Semua bantuan militer dan lebih dari setengah bantuan ekonomi berupa hibah, sehingga yang berbentuk pinjaman itu belum dimulai sama sekali.”(FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961).

Kebijakan yang diterapkan AS di Iran ini memang tampak mengesankan, meningkatkan Produk Nasional Brotu, meningkatkan kemiliteran secara muktahir, dan meningkatkan pendapatan minyak dan gas alam. Di Barat prestasi Syah dipuji dengan antusias, Iran tampak sebagai mercusuar kemajuan dan akal sehat di Timur Tengah.

Setelah menghabiskan uang cukup banyak AS ingin memastikan bahwa investasi politik mereka di Iran. Perubahan-perubahan yang dibuat AS di Iran selanjutnya tidaklah membuahkan hasil yang diinginkan, sebagaimana ditulis dalam majalah *Spectator*,

“Iran mengalami Westernisasi di semua tempat yang salah. Pabrik pembotolan yang modern untuk Pepsi, Coke, dan Canada Dry bermuculan dimana-mana, aliran air terbuka yang berada di sisi jalan dan berisi segala macam sampah. Bandara Teheran merupakan salah satu yang terbaik di Timur Tengah, namun belum ada sistem rel kereta api dan jalan raya yang memadai. Hotel Hilton yang menjulang dibangun, sementara ratusan orang tidur di jalanan”(Archiv Editions, 1977 : 601-602).

Reformasi ini dangkal, pembangunan hanya menguntungkan orang kaya, terkonsentrasi di penduduk perkotaan, dan mengabaikan para petani. Akibatnya, struktur dasar masyarakat tetap tidak tersentuh. Diikuti kesadaran masyarakat Iran yang mempunyai pandangan baru terhadap realitas politik negara mereka. Sewaktu Presiden AS Eisenhower digantikan oleh pemerintahan Demokrat di bawah Kennedy, Presiden baru ini memutuskan untuk mengambil kebijakan proaktif di Iran.

Dipicu oleh Revolusi Irak tahun 1958 dan kudeta terhadap Menderes di Turki pada 1960, AS meyakinkan Syah bahwa struktur sosial negari itu membutuhkan perubahan fundamental jika ingin dinastinya bertahan dan negaranya tidak tenggelam dalam komunisme. Dan mereka menyimpulkan bahwa perubahan yang dibutuhkan itu adalah reformasi agraria (Y. Alexander dan A. Nanes, 1964 : 348).

Ayatullah Borujerdi, Marja Tertinggi, tergerak untuk mengutuk Rancangan Undang-Undang Reformasi Tanah Syah. Reformasi Tanah itu melanggar hukum Syariat tentang kepemilikan, dan Borujerdi mengkhawatirkan bahwa merampas

hak-hak orang yang dijamin oleh Hukum Islam di satu lingkungan dapat menjurus ke pelecehan di bidang-bidang lain.

“Hampir semua pengkritik UU [reformasi agraria] bersatu dalam menyalahkan Amerika karena menerapkannya. Sebagian berargumentasi UU tersebut didesakkan kepada Syah dan Pemerintah oleh Amerika, tanpa peduli berbagai kondisi khusus di Iran-bidang di mana mereka tidak berpengalaman- dengan latar pemikiran yang salah bahwa sistem kepemilikan tanah yang ada saat ini bersifat feodal dan reaksioner. Sebagian lainnya mengatakan Syah mengajukan UU tersebut dalam upaya yang janggal untuk mencitrakan dirinya sendiri di mata publik Amerika yang kurang informasi sebagai monarki `progresif`. Sebagian bahkan percaya bahwa Amerika mendiktekan UU untuk memecah kekuatan politik para tuan tanah, yang biasanya merupakan teman alami Britania di Iran, tanpa peduli tatanan alami masyarakat Iran”(Land Reform, 8 Maret 1980).

Pada dasarnya ini merupakan sebuah penerapan Bonarpatisme, dimana penyewa feodal digantikan oleh para pemilik tanah kecil yang memiliki kepentingan dalam mengelola dan mempertahankan tanah tersebut, sehingga menumbuhkan regenerasi ekonomi dan nasionalisme. Pandangan yang lebih tepat untuk dilihat dalam reformasi agraria ini adalah penilaian dari Duta Besar AS:

“Pertama-tama, reformasi agraria bukan sekedar `reformasi`. Itu adalah sebuah revolusi yang ditunjukkan untuk merusak kekuatan politik dan juga ekonomi kelas paling berpengaruh di negara itu, dan menggantikan kelas ini dengan kaum petani yang semula terbelenggu. Kedua, ada masalah ketidakmahiran manajerial dan pengetahuan ekonomi di pemerintahan, mulai dari Syah hingga ke bawahnya. Karena kesulitan di sini pada dasarnya bersifat politik dan manajerial, ada banyak batasan nyata mengenai apa yang dapat kami lakukan untuk membantu mereka. Jika kami melakukan intervensi langsung, kami akan terseret ke dalam kabut politik Persia dan kepentingan pribadi. Jika kami memberi saran dalam bidang ini dan saran kami diterima, kami menghadapi resiko besar dianggap bertanggung jawab atas kegagalan yang mungkin terjadi akibat ketidakmampuan kami mengendalikan berbagai peristiwa yang mengikutinya. Revolusi tidak dapat dikendalikan oleh pihak asing”(Y. Alexander dan A. Nanes, 1963 : 349-350).

Dengan menyerang ulama Iran dan memulai proses modernisasi, Syah sebenarnya menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang menopang kekuasaannya dengan tujuan menjadikan kaum petani sebagai pengganti ulama. Hal ini menjadikan dia semakin bergantung kepada AS, sementara AS yang semakin terpojokkan dan tidak mempunyai alternatif lain selain mendukung modernisasi Syah Reza.

Pada 1961, sebuah penilaian Dapertemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa:

”Rakyat Persia cenderung secara buta mengikuti orang yang meyakinkan mereka bahwa dia berada di pihak kebenaran, tanpa menelaah berbagai isu politik secara kritis. Karena para anggota kelas menengah urban memiliki dorongan agresif dalam menentang kelas penguasa tradisional dan Barat, wajar bila seorang pemimpin oposisi religius diasosiasikan sebagai oposisi dari kedua kekuatan ini. Semua material tersedia untuk apa yang kita sebut sebagai politik demagogi yang diarahakan kepada kedua kekuatan ini sebagai kambing hitam dan kekuatan jahat” (Y. Alexander dan A. Nanes, 1963 : 349-350).

Faktanya, situasi internal ternyata terfokus kepada kemampuan Syah yang tidak dapat melepaskan diri dari paradoks kekuasaan yang ditimbulkannya sendiri. Ini mencegah munculnya sebuah kelas politik dan administratif yang kompeten, sehingga membuatnya untuk memusatkan kekuasaan ditangannya sendiri. Amerika Serikat sendiri sadar mahasiswa Iran dan ulama semakin kecewa terhadap Syah. Kekecewan yang diperlihatkan jelas terlihat pada kelompok religius yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Salah satu karakteristik yang dimiliki dari dua kelompok ini adalah mereka anti-Barat, terutama AS dan anti-Inggris.

Referandum berhasil mendukung Revolusi Putih, di mana hasilnya 99% rakyat mendukung reformasi. Ayatullah Khomeini mulai meningkatkan protesnya, kali ini retroika yang dilancarkannya berdampak tahanan rumah, yang mimicu huru-hara di Qom dan Teheran. Agitasi konservatif Iran, yang didorong oleh ulama dan

didukung kaum bangsawan yang kesal , pecah menjadi kekerasan jalanan di sejumlah kota.

“Yang lebih penting lagi, peristiwa ini meluncurkan Ayatullah Khomeini ke deretan atas kepemimpinan ulama dengan membentuknya sebagai seorang pemimpin politik. Peran ini dipertegas setahun kemudian ketika Amerika Serikat memutuskan untuk meminta ratifikasi UU kekebalan, yang akan menjamin kekebalan hukum terhadap seluruh personel AS di Iran”(Karen Armstrong, 2006 : 385)

Dalam tahap ini ketakutan terhadap revolusi dan konsekuensinya mulai terlihat, sebagaimana dikatakan Duta Besar Ramsbotham:

“Ini bukan berarti bahwa kondisi di Iran akan mengembangkan sebuah situasi revolusi dalam enam tahun ke depan, mungkin ada cukup pengawasan berimbang bagi terciptanya perubahan tertata di bawah Monarki, jika Syah menghadapi masalah peningkatan iteligenesia dengan pikiran terbuka dan ekspresi sosial: dia menyadari hal ini, meski dengan segan, namun dia tidak tahu bagaimana memulainya. Putranya mungkin terlalu kecil untuk menahan tekanan dari bawah, terutama jika perubahan monarki terjadi melalui kekerasan berupa pembunuhan dengan segala kekuatan emosionalnya. Yang ingin saya katakan saat ini hanyalah bahwa bahaya bagi Monarki dalam 5-6 tahun lagi mungkin lebih besar daripada bahaya jangka pendek”(Wright to Melhuis, 8 Juni 1972).

Dalam mengomtari penilaian ini, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan: “Semakin lama dia (Syah) menunggu, semakin besar dorongan revolusi yang harus dia bendung, enam tahun dalam dunia modern mungkin kelihatannya lama; tapi kita harus ingat bahwa, pada 1978 nanti, kita akan hampir menyelesaikan pengiriman 800 kapten tentara, plus apa pun senjata canggih yang Syah pesan (mungkin termasuk pabrik senjata dan amunisi). Semua peralatan ini bisa berada di tangan pemerintahan revolusioner” (Wright to Melhuis, 21 Juni 1972).

Potensi mengenai revolusi ini sangat tepat, karena penilain ini muncul sebelum Syah menampilkan sikap megalomaniannya. Tidak hanya peka terhadap kritik, tetapi ia sensitif terhadap kritik. Ketika kekuasaan semakin terpusat di tangan Syah dan sensitivitasnya terhadap intervensi asing membuat penilaian situasi politik secara independen menjadi sesuatu yang sulit dilakukan.

Tahun 1975 Syah memulai proses liberalisasi gradualnya dengan mengubah Kalender Islam menjadi Kalender Kekaisaran. Pada 31 Desember 1977, Presiden Jimmy Carter merayakan Tahun Baru di Teheran, Presiden dari Partai Demokrat ini terlihat tidak memiliki alternatif selain mendukung Syah, walaupun kebijakan luar negerinya mengusung hak asasi manusia mendapat sorotan besar. Sebelumnya Syah diundang ke Washington pada November 1977, dimana para demonstran diserang dengan gas air mata yang membuat malu Presiden AS. Tetapi Carter membalas keramahan itu dengan bermalam di Teheran. Dalam lingkungan seperti inilah Carter memberikan pujiannya:

“Iran, di bawah kepemimpinan hebat Syah (adalah) sebuah pulau stabilitas dalam salah satu kawasan paling bermasalah di dunia.” Hal ini, tambah sang Presiden, merupakan sebuah pujian bagi kepemimpinan Syah, dan bagi penghormatan, kekaguman, kecintaan yang diberikan rakyat kepada Anda” (J.A. Bill, 1977 : 233).

Pujian dari Presiden Carter tersebut membuatnya semakin percaya diri, kali ini Syah memutuskan untuk menghadapi seorang pengkhotbah yang selalu menggangukannya sejak 1963 Ayatullah Khomenei yang dibuang ke Turki dan menghabiskan waktu di Najaf Irak. Paradoksnya, Khomenei yang berada di pembuangan semakin dapat mempertahankan komunikasi erat dengan pihak oposisi Iran. Syah menyebut Khomenei sebagai seorang reaksioner, Khomenei juga sering dikritik oleh sesama Ayatullah sebagai terlalu progresif.

“Khomenei yang berbicara secara blak-blakan menjadi fokus kaum oposisi yang mencari arahan dan kepemimpinan, setelah dikecewakan oleh kelas politik di dalam negeri. Kemampuan Khomenei menarik kaum tradisionalis dan kaum muda progresif diabaikan oleh Syah, yang tidak mengerti mengapa anakronisme semacam itu dapat menarik kaum muda idealis” (FCO 8/-*Unrest in Iran*, 1972 : 4).

Paradoksnya, Khomeini yang berada di pembuangan semakin dapat mempertahankan komunikasi erat dengan pihak oposisi Iran. Pandangan yang tidak ortodoks yang ditunjukkan oleh Khomeini ini, mencerminkan warisan intelektual modernis Islam abad ke-19, membuatnya populer dikalangan kaum muda yang idealis.

Faktanya, ternyata Khomeini tampil sebagai seorang yang ahli dalam taktik politik. Cara ia mempertahankan pengikut di kalangan organisasi mahasiswa dan sangat pandai menulis mengenai para pemikir alternatif seperti Ali Syariati, yang ingin merevolusi pemikiran Syiah dan menjadikannya alat aksi politik.

Konfrontasi sangat keras terjadi di Tabriz, dimana 100 orang yang sedang berkabung tewas dan 600 orang di tangkap. Para pemuda memisahkan diri dari prosesi untuk menyerang bioskop, bank, toko-toko minuman keras, tapi tidak ada orang yang diserang.” Empat puluh hari kemudian, pada 30 Maret, orang-orang yang berdukacita turun ke jalan sekali lagi, kali ini untuk meratapi para *syuhada* di Tabriz. Pada kesempatan ini, sekitar 100 demonstran di tembak mati di Yazd saat mereka meninggalkan masjid. Pada 8 Mei, ada prosesi baru untuk menghormati para *Syuhada* tersebut (Karen Armstrong, 2006 : 167).

Ini bukan revolusi yang semata-mata menggunakan agama untuk tujuan politik. Revolusi ini adalah mitologi Syiah yang memberi makna dan tujuan, khususnya dikalangan masyarakat bawah dan tidak berpendidikan tinggi, yang sama sekali tidak berubah oleh proses modernisme Syah Reza.

“Sejauh ini, Syah tidak dapat melihat selain langkah setengah-setengah yang dirancang untuk menghindari keputusan sulit. Sikap depresi yang bimbang seperti yang ditunjukkannya di awal 1950-an membuat orang tidak yakin dia dapat bertindak untuk menyelamatkan sisa-sisa persatuan nasional, kecuali ada pihak-pihak yang turun tangan atas namanya”(The Gathering Crisis in Iran, 2 November 1978).

Respons pemerintah terlalu buruk dalam menghadapi para demonstran. Ketidakmampuan Syah dalam menghadapi demonstrasi semakin meningkatkan kegelisahan di kalangan mayoritas rakyat Iran, yang antagonistik dan tidak peduli terhadap warna religius protes tersebut. Ketika demonstrasi terus mendapatkan momentum yang tidak dapat dihentikan. Pada November 1978, kekhawatiran dikalahkan oleh keterdesakan, di mana pasukan tentara mulai menembaki kerumunan massa yang berdemonstrasi di Teheran, dan Syah tampaknya mulai kehilangan kendali. Hal ini memperjelas bahwa Syah tidak memegang kendali dan juga berbahaya.

Akhirnya 1 Februari 1979, Perdana Menteri Bakhtiar terpaksa membolehkan Khomeini kembali ke Iran. Kedatangan Khomeini di Teheran menjadi salah satu simbol, yang melambangkan perubahan dunia untuk selamanya. Proses ini juga difasilitasi oleh keinginan kaum revolusioner Iran untuk memiliki ciri dan dengan datangnya seorang pemimpin baru, Ayatullah Khomeini, dimana pada saat revolusi mengambil bentuknya di televisi dan nasionalisme religius mengambil alih liberalisme sekuler.

4.2.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Revolusi Islam 1979

Amerika Serikat berharap transisi ini dapat dikelola secara efektif, namun hal ini dapat dicapai hanya jika publik menyadari bahwa revolusi adalah sebuah kenyataan yang diterima Amerika Serikat. Para pejabat Amerika Serikat menolak permintaan berkali-kali dari pihak penentang rezim revolusi untuk mengguncang stabilitas revolusi, dengan beralasan bahwa , “Campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran akan bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat, dimana pasca

Perang Vietnam dan Wategate, petualangan di luar negeri tidak akan ditoleransi oleh rakyat Amerika Serikat.

Pada tahap ini ada desakan diplomatik agar Amerika Serikat mengambil kebijakan yang lebih proaktif terhadap rezim revolusi, dan sebagaimana diindikasikan dalam rekomendasi berikut ini, sebuah laporan yang dikirim oleh Charge D`Affaires Kedubes Amerika Serikat, Bruce Laingen:

“Sebagaimana yang telah direkomendasikan Kedubes ini sebelumnya, kami percaya kita dapat dan seharusnya menemukan cara-cara untuk berbicara secara publik dan secara positif lebih sering daripada yang selama ini kita lakukan mengenai penerimaan kita terhadap perubahan di Iran. Ada dua alasan: yang pertama adalah jelas untuk mengurangi kecuigaan PGOI (Provisional Government of Iran) mengenai tujuan kita, dan yang kedua adalah untuk mengingatkan publik kita sendiri (yang hanya mendapat informasi sepele dari pers Amerika Serikat) mengenai kepentingan jangka panjang kita di Iran. Ini bukan berarti kita perlu secara terbuka merangkul dan mendukung Khomeini. Yang perlu kita katakan, dengan cara yang belum kita lakukan, adalah bahwa kita percaya kita memiliki kepentingan jangka panjang di Iran yang berlanjut yang kami yakin dapat dilanjutkan di Iran yang Islami. Secara spesifik, kami mendesak Departemen untuk menemukan cara agar dapat mengatakan secara terbuka bahwa kita mendoakan keberhasilan Iran dalam mewujudkan cita-cita revolusinya menjadi berbagai bentuk dan lembaga yang akan mendapat dukungan dari rakyatnya : bahwa Amerika Serikat tidak berminat atau berniat menundukkan rezim apa pun, entah itu monarki atau pun, di Iran, bahwa kita selalu menginginkan integritas dan kemerdekaan Iran. Bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam akses ke minyak Iran sejalan dengan kepentingan Iran dalam mempertahankan dan mendanai pembangunan industri dan pertaniannya di masa depan. Kita harus menemukan berbagai peluang serta menerima penekanan Iran Revolusioner dalam Islam dan kontribusi spiritualnya kepada masyarakat sebagai sesuatu yang dipahami dan dihormati oleh Rakyat Amerika, mengingat bahwa rakyat Amerika juga melihat segala hal yang berhubungan dengan semangat sebagai sesuatu yang penting bagi upaya manusia (US Intervention in Iran, 1979 : 126).

Ini merupakan sebuah rekomendasi yang luar biasa dan sayangnya tidak ditindaklanjuti. Sebagaimana yang diindikasikan surat Laingen, posisi Amerika Serikat lebih bersifat lihat dan tunggu: mengamati, mengumpulkan, dan,

menganalisis namun menjaga agar tetap tidak muncul kepermukaan. Komentar Laingen mengungkapkan rasa frustrasi terhadap sikap diam Amerika Serikat sekaligus pengakuan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak menjadi pemain pasif di Iran dan Amerika Serikat harus mengambil sikap bahwa mereka menerima transisi tersebut.

Kaum Republik menilai kegagalan ini sebagai kegagalan kaum Demokrat, terutama karena liberalisme tidak jelas ala Carter. Kaum Demokrat terang-terangan menyalahkan dukungan buta pemerintahan Nixon kepada Syah. Revolusi Islam dan lepasnya Iran sejak awal merupakan bagian agenda politik dalam negeri dan berfungsi sebagai bahan diskusi di kalangan kaum intelektual. Iran jarang dipahami dalam batas kebijakan luar negerinya sendiri. Kelompok-kelompok di AS yang saling menyalahkan kemudian beralih menyalahkan lawan yang di rasa paling tepat, rakyat Iran, yang dianggap telah kehilangan sudut pandang rasional (Ali M. Ansari, 2006 : 101-102).

Mereka mulai menyalahkan rakyat Iran, dan mempunyai pandangan bahwa rakyat Iran tidak dapat dipahami. Karna Revolusi Islam inilah AS meyakini diri mereka sendiri bahwa rakyat Iran sebagai “orang lain” yang irasional. Proses pandangan seperti ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan mengkristal, dibantu dan didorong oleh krisis penyandraan dan pengalaman dalam hubungannya bersama Iran pasca Revolusi Islam.

Didorong oleh elite Pahlevi yang terbuang, Presiden Carter mengizinkan Syah datang ke AS untuk menjalani perawatan medis. Tindakan tersebut memang mulia, namun bukan sebuah langkah yang tepat.

Dengan kedatangan Syah ke AS, dinamika perimbangan situasi pun berubah. Sebagian aktivis, yang dipicu oleh kekhawatiran tulus dan optimisme politik, memutuskan untuk melancarkan pukulan terhadap AS, yang semakin digambarkan sebagai Setan Besar, sebuah alat sematik efektif yang digunakan retrotika Islam Khomenei dalam menentang kapitalisme dan materialisme global (Ali M. Ansari, 2006 : 107-108).

Sebagian pihak mengkhawatirkan terulangnya peristiwa 1953, namun ini merupakan sebuah aksi simbolik terhadap AS yang akan mendongkrak kesatuan nasional dan memutus hubungan kolonial. Sebuah hubungan baru akan memulai sesuatu periode saling menghormati karena Barat hanya memahami kekuatan dan daya. Mereka yakin bahwa hanya dengan kekuatan yang dihormatilah mereka dapat mulai membahas detail hukum internasional.

Pada 4 November 1979, Charge D`Affaires, Bruce Laingen, sedang membahas berbagai pengaturan keamanan di kedubes AS bersama para pejabat di kementerian luar negeri Iran saat muncul kabar bahwa para mahasiswa telah menginfasi dan menduduki kompleks kedubes. Para perwira dan marinir AS yang menjaga kedubes pada awalnya beranggapan hal ini merupakan pengulangan peristiwa pengambilalihan pada 14 Februari, yang dapat diatasi dengan beberapa telepon darurat. Kedubes Inggris mengalami serangan yang sama, namun para pelaku kedudukan segera disingkirkan. Namun peristiwa penyerbuan kedubes AS ini, meski pemerintah sementara mengecam penyerbuan itu, organ-organ kekuasaan revolusi tampaknya tidak begitu bersemangat untuk segera mengatasi isu ini. Tambah lagi, kehadiran senjata dikalangan para mahasiswa menegaskan pada para staf kedubes bahwa penyerangan kali ini bukanlah aksi penyerbuan biasa (Ali M. Ansari, 2006 : 108).

Penyerbuan kedubes ini bukanlah sebuah krisis yang terkelola, tetapi merupakan refleksi mengenai sebuah masalah yang jauh lebih mendalam pada politik lembaga revolusi Iran. Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan keberagaman politik Iran melainkan juga pergesekan didalamnya. Keputusan untuk menduduki kedubes AS menyatukan berbagai fraksi berbeda di Iran dalam suatu isu besar. Kini jelas bahwa tidak ada master plan untuk mengambil kedubes AS.

Penyerbuan Kedubes Amerika Serikat beserta 52 diplomat merupakan momen yang menentukan dalam sejarah hubungan Amerika Serikat dan Iran, terutama dalam cara rakyat Amerika Serikat memandang Iran dan rakyat Iran. Berlangsung

selama 444 hari, pengalaman itu mendekam dalam benak masyarakat dan menjadi bagian dari landskip politik. Disiarkan dan dipublikasikan di TV secara luas yang memperlihatkan kegagalan misi penyelamatan sandera, disiarkan media dengan segala kengeriannya, meningkatkan keputusan pemerintah Carter. Amerika Serikat langsung memutuskan hubungan diplomatik, membekukan berbagai aset Iran di Amerika Serikat, dan menerapkan sanksi ekonomi.

Hubungan yang berkembang kemudian mengambil bentuk berupa ketiadaan pihak lain. Bagi AS, yang baru saja bangkit dari ketidakpastian era 1970-an, peristiwa ini merupakan aib besar. Namun bagi kaum revolusioner Iran, peristiwa ini menandai dimulainya sebuah obsesi AS terhadap Iran, yang semakin diperkuat oleh intimidasi 25 tahun sebelumnya dan perasaan terkhanati.

Pada musim panas 1980, hubungan antara Republik Islam yang baru dan Irak dibawah pimpinan Partai Baath mengalami kemerosotan tajam saat duta besar Iran di Baghdad mengambil sikap tidak diplomatik dengan mendorong kaum Syiah di Irak menggulingkan Saddam Husein. Pendekatan diplomatik seharusnya berupa pengajuan protes terhadap intervensi duta besar Iran dalam urusan domestik negara lain, dengan mengaitkannya mengenai ketidaksukaan wajar Iran terhadap AS. Pilihan lainnya adalah mempersona-non-geretakan sang duta besar. Namun Sadam Husein memiliki rencana lain dan mengatur sebuah peluang untuk mengubah perimbangan kekuasaan di kawasan yang sulit itu (Ali M. Ansari, 2006 : 118).

Dalam mempertimbangkan awal Perang Irak-Iran pada September 1980, kita harus ingat bahwa Iran bukan hanya sebuah kekuatan revolusi melainkan juga sebuah kekuatan revolusioner dengan asal-usul imperial. Kekhawatiran negara-negara Arab , dan terutama Irak mengenai revolusi Iran diperkuat oleh kekhawatiran mengenai imperialisme budaya Iran yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam hagemoni politik. Ketakutan ini disuburkan oleh Syah,

yang sifat megalomaniannya dikenal luas, dan kini diperkuat oleh tambahan dimensi perjuangan religius.

Saat Saddam Hussein melancarkan invasinya pada September 1980 komunitas internasional tidak menunjukkan reaksi yang diinginkan Iran. Alih-alih mengutuk invasi tersebut, Dewan Keamanan PBB malah mengajukan senjata dan penarikan pasukannya sebelum perang. Menurut duta besar Britania di PBB Sir Anthony Parsons, yang baru saja meninggalkan posisinya di Teheran, krisis penyanderaan yang berkelanjutan itu membuat Iran tidak mempunyai teman dikalangan diplomat dunia (Ali M. Ansari, 2006 : 119).

Iran tampaknya menerima tantangan itu, dengan menerjemahkan isolasi tersebut sebagai bukti kebenaran keyakinan revolusinya dan perlambang sikap reaksioner tatanan internasional. Perang ini berdampak besar terhadap masyarakat Iran. Rakyat yang terguncang menjadi reflektif dan antiperang. Perang itu sendiri selalu dianggap sebagai sebuah keterpaksaan. Tidak ada perbedaan ideologi militerianisme atau glorifikasi perang di antara kedua belah pihak.

Republik Islam Iran yang bangkit dari perang pada 1988 diwarnai oleh upaya mengatasi proses demobilisasi. Didorong dari revolusi menuju perang dan diwarnai antagonisme, konflik, dan kecurigaan di masa-masa awal, masyarakat Iran tidak banyak waktu untuk mengatasi banyak isu yang ada di depan mata mereka mengenai revolusi. Revolusi bertahan, dan walau ekonomi mandek, Republik Islam Iran tidak terjebak dalam hutang besar dan dapat memulai proses rekonstruksi dengan kondisi keuangan yang baik (Ali M. Ansari, 2006 : 119).

Perang mengajarkan rakyat Iran mengenai pentingnya swasembada dan mempertegas ideologi revolusi, yang menganggap Barat, dan dalam kasus ini para pemasok asing sebagai sangat layak tidak dipercaya. Perusahaan-perusahaan asing yang terus bekerjasama dengan Iran dipandang lebih positif. Namun secara keseluruhan, pandangan sinis terhadap Barat menjadi terkonfirmasi dan dipertegas.

Saat Khomeini wafat pada Juli 1989, duka massal yang mengiri pemakamannya meyakinkan kaum skeptis bahwa sistem politik yang dikenal sebagai Republik Islam itu memiliki fondasi yang kokoh. Bahkan pemerintah baru George H.W. Bush di AS sempat memikirkan untuk memulai sebuah dialog, jika saja rezim yang ada populer dan AS harus menghadapi kenyataan yang mereka hadapi, tidak peduli betapa tidak mengguntungkannya.

Republik baru Azerbaijan, menjadi fokus konteks antara kepentingan AS dan Iran yang republik yang baru saja merdeka itu. Alasannya klasik, yaitu minyak. Faktanya, jika sebuah negara yang baru muncul, minyak dan gas merupakan jalan bagi mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan Azerbaijan, dengan akses ke cadangan minyak di Kaspia siap di eksploitasi dan merupakan tujuan langsung perusahaan-perusahaan Barat.

Perjanjian terakhir mengenai status Kaspia ditandatangani antara Uni Soviet dan Iran pada 1941, di mana Kaspia diperlakukan sebagai danau untuk tujuan pembagian sumber dayanya. Ini berarti bahwa negara-negara disekitarnya akan berbagi sumber daya. Pengaturan ini tidak sulit karena hanya ada dua negara yang terlibat. Kini para pengusaha korporat berargumentasi bahwa status legal tersebut terbuka untuk bahan diskusi karena Uni Soviet sudah tidak ada (Ali M. Ansari, 2006 : 164).

Ini adalah sebuah argumentasi yang jelas mengabaikan fakta bahwa masih ada satu negara penanda tangan lainnya. Tambah lagi, terlepas dari segala irasionalitas revolusinya, ada ketidaknyamanan geografis yang dihadapi para perencana AS bahwa Iran merupakan kekuatan Kaspia. Meski mencoba mengabaikan Iran, realitas geopolitik akan membuatnya sulit dilakukan.

Pendekatan dasar dalam hubungan internasional ini berlanjut hingga sekarang, dengan intensitas lebih tinggi, dan merupakan alasan yang buruk untuk sebuah

kebijakan. Iran tampaknya memicu antusiasme di kalangan sebagian pembuat kebijakan politik luar negeri AS, yang anehnya berkesimpulan bahwa iritasi sama dengan efektifitas.

Berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat mengumunkan sebuah Tatanan Dunia Baru, dengan mengusir pasukan Irak dari Kuwait selama Perang Teluk Persia tahun 1991. Ini merupakan masa yang tepat untuk mengevaluasi dan memikirkan kembali berbagai tantangan internasional yang dihadapi AS.

Para pejabat Kebijakan Luar Negeri AS yang lebih optimis berpendapat bahwa Barat dan AS menyadari bahwa Iran sebenarnya merupakan sebuah “pulau stabilitas” dan sebuah hubungan dapat dibina. Fakta bahwa Uni Soviet bukan lagi sebuah ancaman signifikan tidaklah penting karena Iran tetap merupakan sebuah negara penting yang dapat menghubungkan dan menstabilkan republik-republik baru di Asia Tengah dan Trans-Kaukasia (Ali M. Ansari, 2006 : 153).

Invasi Saddam Husein ke Kuwait memperjelas bahwa ia adalah ancaman yang sebenarnya bagi stabilitas Teluk Persia, bukan Iran. Saat PBB menyatakan Irak sebagai agresor, yang merupakan sebuah sikap simbolis namun sangat penting bagi Iran dengan mengembalikan sisa-sisa teritori Iran yang masih dikuasainya.

Indikasi lebih jauh adalah bahwa pencarian hubungan itu merupakan sesuatu yang bersifat sementara dalam peperangan, saat negara-negara Arab dan AS khawatir mengenai kemungkinan bahwa Iran akan mengeksploitasi kelemahan Irak, terutama di selatan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa pasukan Koalisi tidak meneruskan perang hingga ke Baghdad dan tampaknya dimaksudkan agar Saddam Hussein bisa memadamkan pemberontakan Syiah, yang waktu itu mendapatkan momentum sebagai tanggapan atas seruan mengangkat senjata dari Presiden Bush (Ali M. Ansari, 2006 : 154).

Serangan AS terhadap Irak ini akan mempengaruhi perimbangan kekuatan regional, dan para negara tetangga Iran yang Arab takut negara Syiah revolusioner itu memetik manfaat terlalu besar dalam hal politik dan strategi dari kebodohan

Saddam Hussein. Meski ada upaya resmi dari Iran untuk memperbaiki perasaan inferior negara-negara Arab, berbagai komentar tidak resmi yang terlontar membuat semua orang yakin bahwa “karakter imperial” masih ada dan bahwa Iran menganggap kawasan Teluk sebagai Persia.

Dibesar-besarkan oleh bumbu politik penguasa setempat paham bahwa kecaman secara terbuka terhadap Iran merupakan cara terbaik untuk mengamankan dan mempertahankan dukungan AS.

“Saat AS membahas pengaturan keamanan pascaperang di kawasan itu. Iran merasa mereka seharusnya menjadi bagian dari aprarat keamanan, namun anehnya mereka ternyata disingkirkan dari segala pembahasan. AS malah menyatakan bahwa negara-negara setempat ingin membentuk aliansi dengan Mesir dan Suriah, sebuah pengaturan keamanan yang dianggap pihak Iran sebagai diarahkan terhadap mereka bukannya Saddam Hussein (Iran Times, 1991 : 1-12).

Meski AS menyingkirkan Iran dari pembahasan, Presiden Bush menyepakati pencairan hubungan di antara kedua negara. Kesepakatan prospektif waktu itu berkisar pada pelepasan sandera AS di Libanon, memulai proses normalisasi hubungan, termasuk berbagai pelepasan aset Iran yang dibekukan di AS sejak Revolusi 1979. Rafsanjani memenuhi janjinya dengan memberi tekanan pada berbagai kelompok di Libanon dengan biaya yang dilaporkan berkisar \$2 juta.

Terpilihnya Bill Clinton akan mengubah landskip politik di Timur Tengah, kepentingan internasional AS pasca-Perang Dingin akan mengubah aturan main.

Dari sudut pandang Timur Tengah, masa bakti pertama Clinton didominasi oleh prioritas Israel, dalam sebuah pergeseran kebijakan kualitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bush, dan terutama Menteri Luar Negeri James Baker, dikenal dengan pendekatan imarsial mereka terhadap konflik Arab-Israel, yang dilambangkan dengan kecaman verbal Baker terhadap pemerintah Israel dalam sebuah sesi dengar pendapat Kongres (Ali M. Ansari, 2006 : 159).

Pemerintahan baru Partai Demokrat ingin memperkuat kembali posisinya sebagai teman alami Israel dengan kebijakan Timur Tengah yang didominasi oleh kepentingan Israel. Menyankut Iran, Bill Clinton mengeluarkan kebijakan pengabaian:

Kebijakan Pemerintahan Bill Clinton untuk menerapkan kebijakan pengekanan ganda terhadap Iran ini merupakan sebuah karantina politik yang menyerupai, mendukung, dan menopang karantina intelektual, sehingga memperparah jurang kesalahpahaman dan mendorong perbedaan yang semakin lebar antara AS dalam pendekatan terhadap Iran. Dengan ketiadaan personel di lapangan dan ketiadaan kepentingan di Iran, akumulasi ketidakpedulian AS semakin meningkat dan memuaskan (Ali M. Ansari, 2006 : 161).

Kebijakan ini mencoba melegitimasi non aksi melalui alokasi sebuah nama merk yang dapat dikenali, yaitu sebuah keputusan untuk melanjutkan sikap tidak memutuskan. Iran, beserta Irak, akan dikekang dalam sebuah keputungan, dimana Iran dapat melakukan apa saja yang mereka sukai selama tindakan itu tidak mengganggu pihak lain. Hal ini juga berlaku pada masalah ekonomi :

Keputusan untuk menawarkan kontrak signifikan sebesar \$1 miliar kepada perusahaan minyak AS Conoco tidak mendapat reaksi yang diinginkan. Conoco mendapati dirinya berada dalam tekanan besar, terutama dari American-Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), untuk melupakan transaksi itu, sementara Presiden Clinton bergerak cepat mengeluarkan perintah eksekutif yang membatasi segala hubungan ekonomi (Ali M. Ansari, 2006 : 167).

Embargo ini diumumkan pada sebuah pertemuan Kongres Yahudi Sedunia, yang mengejutkan banyak pihak di Iran. Sementara itu Arab Saudi didorong untuk mengajukan pesanan dalam jumlah besar kepada Boeing sekaligus meredakan tekanan dalam bidang ini. Rafsanjani menemui kegagalan besar, dia dan pengikutnya tidak hanya gagal melainkan malah memperkuat sikap AS.

Presiden Bill Clinton mulai menetapkan sanksi lebih luas terhadap Iran melalui keputusan eksekutif, menutup satu-satunya kemungkinan nonpolitik signifikan untuk keterlibatan. Keputusan eksekutif Clinton mengakhiri ikatan ekonomi coba-coba semacam itu, namun hal ini disambut baik oleh para pesaing perusahaan AS karena pasar Iran bebas dari perusahaan AS. Tetapi, perusahaan AS tidak suka dengan cara bebas hambatan yang disediakan bagi para pesaing mereka, hal ini adalah akibat dari obsesi mereka terhadap Iran.

D'Amato merepresentasikan suatu jenis baru politik Republik yang lebih ideologis dan cenderung ke lobi Israel. D'Amato, senator dari New York mengusulkan perluasan sanksi tersebut sebagai alat politik bagi bukannya hanya negara sasaran (dalam hal ini Iran) melainkan juga bagi semua pihak ketiga yang mungkin melanggar kebijakan AS. Iran-Libya Sanction Act (ILSA)- Libya ditambahkan kemudian oleh Senator Kennedy- coba menerapkan sanksi sekunder kepada negara mana pun yang ingin berinvestasi dalam industri minyak dan gas di Iran dengan menutup akses bagi negara tersebut ke pasar dan keuangan AS (Ali M. Ansari, 2006 : 168-169).

Kebijakan ini intinya sederhana, teman atau musuh. Uni Eropa tidak suka dengan fatwa komersial ini, demikian juga dengan negara lain dengan memprotes terhadap penerapan kekuasaan imperial AS ini dan sikap kerasnya dalam memaksakan sikap politiknya.

Tetapi bagi Amerika Serikat, ini masalah prinsip, dan ini jelas merupakan ekspresi irasional obsesi Amerika Serikat terhadap Iran, yang dengan berakhirnya Perang Dingin mulai mendominasi dunia ketiga. Kebijakan pengabaian ini jelas mengusik Presiden baru Republik Islam Iran Sayyed Mohammad Khatami.

Berikut merupakan pernyataan yang fundamental dari pidato Sayyed Mohammad Khatami dalam sidang umum PBB di New York :

“Ada tembok besar ketidakpercayaan antara kami dan pemerintahan Amerika, sebuah ketidakpercayaan yang berakar pada perilaku tidak tepat yang ditunjukkan pemerintah Amerika. Sebagai contoh dari jenis perilaku ini, saya harus merujuk pada pengakuan keterlibatan pemerintah Amerika dalam kudeta 1953 yang mendongkel pemerintahan nasional Mosaddeq dengan sebuah pinjaman senilai \$45 juta untuk memperkuat pemerintahan kudeta. Saya juga harus merujuk pada UU kapitulasi yang diterapkan oleh pemerintah Amerika terhadap Iran. Slogan anti-AS bukanlah ditunjukkan untuk menyinggung rakyat AS atau merendahkan pemerintah AS, melainkan mencerminkan keinginan rakyat Iran untuk “menghentikan model hubungan antara Iran dan Amerika.” Kami merasa bahwa yang kami cari adalah sama dengan apa yang dikejar oleh para pendiri peradaban Amerika empat abad silam. Itulah sebabnya kami merasakan keterkaitan intelektual dengan esensi peradaban Amerika” (BBC SWB ME/3120 MED/2).

Pandangan ini sangat luar biasa (de Tocqueville), signifikansi peradaban Amerika adalah kenyataan bahwa kebebasan menemukan agama sebagai dasar bagi pertumbuhannya, dan agama menemukan perlindungan kebebasan sebagai seruan Tuhan. Khatami berpendapat bahwa bukannya merupakan antitesis satu sama lain, AS dan Iran justru memiliki kesamaan minat dalam agama. Dia terutama ingin mengidentifikasi Iran dengan gagasan spesifik AS mengenai “demokrasi religius”.

Khatami memutuskan isu ini lebih baik ditangani dengan menempatkannya dalam suatu bingkai rekonsiliasi. Dia mencap bingkai ini sebagai “Dialog Peradaban”, sebuah tanggapan langsung atas tesis “Benturan Peradaban”, yang menekankan komunikasi budaya bermakna. Meski dicerca oleh kritikus di dalam dan luar negeri atas liberalisme yang tidak jelas, Khatami tetap serius dan sungguh-sungguh dalam upaya ini. Proses keterlibatan kelihatannya siap; tahun 2001 akan menjadi “Tahun Dialog Antar-Peradaban” (BBC SWB ME/3763 MED/8, 2000 : IRNA).

Presiden Bill Clinton pada masa jabatan keduanya terbukti mendukung secara antusias kemungkinan akan hubungan yang lebih baik. Hal ini memang mengejutkan namun perubahan ini bisa kita lihat ketika Clinton hadir di PBB, ketika Khatami tampil dan dengan sengaja tinggal untuk menyimak pidato sang Presiden Iran. Hal ini diperkuat tahun 2000 ketika Menteri Luar Negeri AS Madeline Albright secara formal memberi tanggapan terhadap proposal Khatami. Ini merupakan pernyataan publik yang paling konstruktif dari seorang pejabat AS dalam dua dasawarsa.

Albright secara resmi membuat pernyataan bukan hanya soal tindakan tahun 1953 yang disesalkan, melainkan juga soal kepicikan yang membuat Amerika Serikat mendukung Saddam Hussein pada perang Iran-Irak. Dalam banyak segi, pernyataan yang disebut terakhir ini lebih signifikan karena diungkapkan secara langsung kepada veteran perang Irak-Iran. Meskipun ini hanya sikap yang relatif tidak besar, signifikasinya terletak pada fakta bahwa Amerika berdialog dengan rakyat Iran dan dengan ketakutan mereka dibandingkan berbicara *kepada* mereka soal masalah Amerika. Alih-alih berbicara soal “apa yang kami inginkan”, Amerika berbicara soal “apa yang bisa kami lakukan untuk Anda” (Ali M. Ansari, 2006 : 202).

Kaum konservatif menentang revisi ini, dengan mengatakan bahwa sebagian Reformis ternama adalah para mahasiswa yang dulu mengambil alih kedubes dan sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Pandangan seperti ini juga yang diadopsi oleh kelompok konservatif di AS. Kelompok-kelompok ini mempunyai kesamaan ideologis yang terkonsolidasi selama bertahun-tahun, yang akan membuat kelompok Reformis di Iran sangat tidak nyaman.

Pada saat seperti inilah Khatami gentar, dia malah berusaha mencari kompromi dengan kaum konservatif. Tetapi seperti yang bisa ditebak kaum konservatif tidak akan mau berkompromi, karena ancamannya terlalu serius. Khatami juga tidak mampu memberikan jawaban yang suportif dan belum siap untuk berjabat tangan secara simbolis dengan Presiden AS, mungkin hal ini dikarenakan pada fakta bahwa ia berada dalam akhir masa jabatannya. Karena dalam politik, penentuan waktu adalah segalanya.

Ini adalah kesempatan besar yang terlewatkan. Khatami dan Clinton harus menerima kritik dari kaum konservatif di dalam negeri yang terus menentang perkembangan seperti ini. Ini menandakan bahwa kedua presiden tidak mampu mengatasi pengkritik mereka di dalam negeri. Khatami yang berada dalam posisi kontradiktif dengan Kongres Amerika Serikat merasa sulit untuk bergerak.

Serangan 11 September 2001, mengejutkan Amerika Serikat :

AS, didukung penuh oleh komunitas internasional dan PBB, berniat membalas Taliban di Afghanistan. Amerika Serikat membutuhkan Iran, dan Iran sebaiknya bersikap bermurah hati untuk membantu. Rangkaian peristiwa yang terjadi secara efektif berfungsi, setidaknya pada tataran regional dan partikultural, menyeimbangkan kondisi hubungan antara Iran dan AS (M. Hajizadeh, M. 2002 : 143-146).

Negosiasi-negosiasi awal sebelum invasi ke Afghanistan tahun 2001 terus dilakukan agar Iran mau membantu pasukan koalisi dalam melawan Afghanistan. Hal ini lebih merupakan sebuah strategi yang dibutuhkan pasukan koalisi untuk dapat masuk, dan yang lebih penting dapat keluar dari Afghanistan dengan aman.

Iran memberi hak terbang semua pilot pasukan koalisi di wilayah Iran. Iran juga memainkan peran konstruktif dalam negosiasi berikutnya soal masa depan Afghanistan di Bonn. Dengan gaya diplomasi dan kepiawaian mereka yang membuat James Dobbins terkesan:

Perwakilan Bush untuk konferensi Bonn, James Dobbins, mengatakan bahwa “orang-orang Iran sangatlah profesional, tegas dan dapat diandalkan, dan sangat membantu, mereka juga kritis terhadap keberhasilan kita. Mereka mengajak Aliansi Utara (musuh-musuh Afghan Taliban) untuk membuat kesepakatan-kesepakatan akhir yang kita minta”. Dobbins membawa proposal tersebut ke sebuah pertemuan penting di Washington hanya untuk menghadapi kebisuan. Menteri Pertahanan saat itu Donald Rumsfeld, ucapnya “Menatap kebawah dan menggemerisikan kertas-kertasnya.” Tidak ada jawaban yang diberikan kepada Iran. Kenapa harus dipikirkan? Mereka gila (Newsweek, 3 April 2006).

Versi asli dari kesepakatan Bonn mengabaikan pembahasan tentang demokrasi atau perang melawan terorisme. Para perwakilan Iranlah yang menyadari kelalaian seperti ini dan meminta agar pemerintahan baru di Afghanistan diwajibkan untuk melakukan keduanya. Upaya-upaya Iran melakukan upaya yang konstruktif tidak pernah dihargai oleh pemerintah AS. Walaupun terlihat meyakinkan, ternyata Khatami kembali gagal dalam usahanya.

Pada Januari 2002, Israel melancarkan serangan tiba-tiba dengan mencegat dan merebut *Karine A*, kapal bermuatan penuh senjata yang diperutukan bagi Otoritas Palestina dan dikabarkan datang dari Iran. Temuan ini pas dalam hal waktu sehingga bahkan sekutu dekat Israel itu enggan mengakui klaim Israel. Perdana Menteri Israel Ariel Sharon menikamati propaganda kudeta yang dimungkinkan oleh pendudukan kapal itu dan mempertontonkan kepada kamera senjata yang dikapalkan, yang di penuh aksara Persia. Tidak ada penyangkalan yang cukup dari Iran untuk menagkal efek hal ini dan Israel jelas merasa puas (Ali M. Ansari, 2006 : 210).

Disusul dengan isu di Iran bahwa berbagai jaringan baru sedang tumbuh antara kelompok garis keras Iran dan orang-orang Bin Laden. Hubungan seperti ini sulit diverifikasi. Tuduhan lainnya adalah bahwa segelintir anggota Garda Revolusi Iran (IRGC) menyediakan fasilitas bagi para buronan Afghanistan dengan imbalan uang. Dikabarkan bahwa Rafsanjani dan Khatami harus turun tangan untuk mengakhiri korupsi tersebut setelah mereka didesak oleh para anggota IRGC yang tidak menyukai kondisi ini (www.iran-press-service.com/articles_2002/jan_2002/afqanestan_iran-qaeda_18102).

Ini merupakan kerangka politik yang buruk, dimana hubungan antara Iran dan terorisme mulai tertanam dalam pikiran Amerika Serikat. Hal ini juga diperburuk oleh ketidakmampuan birokrat Iran dalam menghadapi media massa modern. Naiknya kelompok neokonservatif AS di bawah pemerintahan Bush merupakan pertanda bahwa masa tenang telah selesai. Dan meyakinkan kita bahwa Presiden Khatami, terlepas dari segala daya tarik kelompok Reformisnya, ternyata tidak memegang kendali kepemimpinan dalam pembuatan kebijakan di Iran.

Kegagalan ini diperparah oleh pidato kenegaraan Presiden George W. Bush, yang merupakan sebuah serangan mematikan bagi kelompok Reformis Iran.

Pada akhir 2002, Presiden Bush memberikan pidato kenegaraan di mana dia menggambarkan Iran, bersama dengan Irak dan Korea Utara, sebagai bagian dari "Poros Setan". Jarang ada ungkapan retorik yang memiliki dampak semengerikan retorika Bush. Hanya sedikit orang yang menerima konsep bahwa Iran berada dalam posisi yang sama dengan musuh bebuyutan mereka Saddam Hussein atau dengan rezim totaliter di Korea Utara (Ali M. Ansari, 2006 : 212).

Tidak ada satu pun dari anggota Poros Setan ini terkait dengan jaringan Al-Qaeda atau peristiwa 11 September. Pidato kenagaraan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana konsep AS dalam membuat kebijakan serta cara penyampaiannya. Apakah ini hanya sebuah ketidaksengajaan, atau apa yang ingin Bushlihatkan dari pidatonya tersebut. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kebijakan inti

politik luar negeri AS terhadap Iran itu kacau. Sepertinya kelompok neokonservatif di AS mengadopsi motif teologis yang biasanya dituduhkan kepada para ulama Iran.

Kelompok garis keras di Barat menarik kesimpulan mereka sendiri dari perkembangan ini, mengabaikan fakta bahwa mereka terlibat dalam pemberhangan Gerakan Reformasi. Karena tidak mau terlibat dialog dengan orang-orang yang bersedia berpartisipasi, kelompok garis keras di Barat memicu serangan balik. Bagi kelompok garis keras, posisi keras adalah satu-satunya langkah maju. Ini adalah lingkaran setan yang buruk dan absurd di mana kengototan kelompok garis keras di kedua kubu berujung pada *self-fulfilling prophecy* (ramalan yang terjadi karena ulah sendiri) dan pembenarannya (BBC SWB Mon ME1 MEPol, 2002 : IRIB).

Ketika kaum neokonservatif AS berjaya, kelompok garis keras di Iran memulai aktifitasnya untuk melengserkan kelompok Reformis yang dianggap tidak kompeten di kancah internasional.

Musim panas 2002, kepala lembaga yudikatif Teheran mengeluarkan perintah yang melarang “perdebatan mengenai perdebatan dengan Amerika Serikat.” Tayangan ini di televisi negara memerlukan waktu cukup lama untuk dicerna karena tidak jelas efek apa yang ingin ditimbulkan oleh aturan semacam itu. Politikus dan dosen marah akan dampak yang ditimbulkan dan dengan tegas mengecam langkah tersebut. Akhirnya, Khatami sendiri turun tangan dan mencela lembaga yudikatif Teheran atas kekeliruan mereka sembari menyatakan bahwa waktu untuk mengadakan pembicaraan dengan AS tidak tepat (Ahmad Zaydabadi, 2002 : BBC SWB Mon MEPol).

Pada tahap ini kehadiran kelompok neokonservatif begitu terasa, Pada akhir tahun 2002 kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terpatir pada Irak. Meskipun sejumlah pakar mengatakan bahwa fokus perhatian AS seharusnya ada pada Iran. Dalam eskalasi menuju perang Irak, hal ini terus menguat dan pada akhirnya AS dan Iran menjadi tetangga, dan bukan hanya dalam satu daerah perbatasan.

4.3 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran

4.3.1 Program Nuklir Republik Islam Iran

Ketika perekonomian Iran meningkat di bawah kepemimpinan Syah Reza Pahlevi, dimana uang tersedia dan Syah mulai memperlihatkan kekuatan komersialnya dengan membeli beberapa saham di berbagai perusahaan Barat. Salah satu pembelian yang paling signifikan adalah teknologi nuklir. Selama kunjungan ke Britania pada 1972, Syah mengadakan diskusi dengan Lord Rothchild, yang waktu itu menjabat kepala Central Policy Review Unit di Downing Street dan orang dekat kepercayaan Perdana Menteri Edward Heath.

“Saya mengajukan pertanyaan tentang tenaga nuklir kepada Syah. Dia mengatakan dia ingin setara secara teknologi dengan Amerika Serikat dan Britania Raya. Saya menjelaskan kepadanya ada kemungkinan bahwa dia *melampaui* kedua negara tersebut dalam bidang Reaktor Pembiakan. Syah sangat memahami program pembangkit listrik Iran dan mengatakan bahwa dia berpendapat masih ada peluang untuk jenis reaktor yang ada di kepala saya. Saya bertanya apakah dia cukup tertarik untuk membiarkan saya mengatur suatu kunjungan serang pakar ke Iran. Dia menjawab ya dan mengindikasikan bahwa dia ingin bertemu dengan sang pakar. Saya pikir mengirim seorang pakar ke Iran tidak akan menimbulkan masalah. Sepanjang yang saya ketahui, yang dapat menimbulkan masalah justru ketiadaan organisasi penjualan yang mulai dari sekarang hingga seterusnya dapat dipercayai untuk melakukan negosiasi. Saat dipercayai sebuah organisasi, kita tidak boleh mengabaikan kekhususan negosiasi di Iran, di mana saya memiliki cukup pengalaman saat menyiapkan proyek agrobisnis. Kemungkinan DTI akan segera memutuskan organisasi pengadaan stasiun tenaga nuklir macam apa yang akan dimiliki Britania. Sebelum itu terjadi, kita tidak dapat melakukan apa pun selain mengirim seorang pakar ke Iran...Menimbang kekhususan dan kerahasiaan negosiasi di Iran, saya benar-benar ingin agar tidak ada kebocoran informasi apa pun mengenai proyek ini, yang merupakan salah satu alasan mengapa memo ini ditandai Rahasia dan pribadi (Prem 15/1684 *Meeting Shah-Rothchild, December 2, 1972*).

Inggris lah melalui Lord Rothchild yang awalnya membantu Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir dengan mengirimkan seorang pakar. Namun tidak lama kemudian Amerika Serikat mulai terlibat dalam penjualan teknologi nuklir yang diniatkan untuk memberi Iran pasokan listrik.

Pada 1974, Amerika Serikat menandatangani sebuah kesepakatan sepuluh tahun untuk memasok Iran dengan uranium yang telah diperkaya. Pada tahun yang sama, Iran mengumumkan niatnya untuk memesan lima pembangkit listrik tenaga nuklir dari Prancis. Kanada juga menandatangani kesepakatan untuk kerjasama nuklir, sementara Britania berkonsentrasi pada penyediaan pelatihan kepada ilmuwan nuklir Iran. Secara keseluruhan, Iran ingin “memasang sekitar 28.000 MW kapasitas nuklir (AB65/611 Iran: Introduction of Nuclear Power, correspondence, 1969-1985).

Pada tahap ini, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mulai menjual dan mengembangkan teknologi nuklir untuk kapasitas listrik Iran. Dalam tahun-tahun sebelum Revolusi, tidak ada masalah terkait pengembangan teknologi nuklir oleh Iran. Mereka khawatir bahwa Syah akan mengejar opsi militer terhadap program nuklir nya. Kita akan lihat gagasan-gagasan Amerika Serikat untuk membatasi pengayaan uranium di Iran :

Henry Kissinger mengusulkan pendirian usaha kerja sama internasional untuk mengelola dan mengawasi pengayaan nuklir tersebut, yang sekaligus mencegah Iran tidak menganggap usulan itu sebagai sesuatu yang praktis sama sekali. Dari diskusi-diskusi awal ini, jelaslah ada masalah dalam sistem non-proliferasi. Pada saat bersamaan, Eternad mengemukakan sebuah diskusi terbuka yang akhirnya dia adakan dengan Syah mengenai ambisi nuklirnya. Syah menandakan, sebagaimana yang dilakukan para penerusnya, tidak ada tempat dalam doktrin keamanan Iran bagi senjata nuklir. Bahwa Angkatan Bersenjata Iran jauh lebih superior dibanding musuh regional potensial manapun; dan bahwa konsep pencegahan strategis terhadap Uni Soviet tidak bermakna karena Iran tidak dapat pernah menyamai kemampuan nuklir Soviet. Situasi selalu dapat berubah dan jelaslah bahwa Syah ingin menjaga setiap pilihan tetap terbuka. Pendekatan ini tidak akan berubah hingga sekarang, meski situasi militer telah berubah (Memoir Dr. Etemad, www.iranian.com/books/march98/Nuclear/Images/p1.gif).

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa sejak awal digunakannya non-proliferasi treaty (NPT) oleh Iran yang diatur oleh Amerika Serikat mempunyai kelemahan-kelemahan. Tidak adanya kepercayaan adalah yang paling penting mengenai pengayaan uranium oleh Iran, dimana yang awalnya non –proliferasi ini digunakan untuk tidak menyinggung Iran. Tidak ada pernyataan atau tindakan yang benar-benar tegas jika Iran hanya mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Ini adalah perjanjian sukarela, yang dimaksudkan untuk tidak menyinggung siapa pun.

4.3.2 Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Nuklir Iran 2003-2008

Khalayak sudah banyak mengetahui jika Iran memiliki program nuklir. Para anggota utama pemerintahan Bush, juga sudah menduduki jabatan senior di bawah Presiden Ford. Mustahil mereka tidak tahu-manahu tentang ambisi nuklir Iran. Selain itu, salah seorang anggota baru tim, Duta Besar Zalmay Khalilzad, menulis tesis doktral tentang proliferasi nuklir dengan kasus tentang Iran. Namun terus dikembangkannya program tersebut setelah Revolusi Islam membuat para presiden penerusnya khawatir, termasuk Clinton. Publik sudah tahu, misalnya, bahwa Iran telah menemukan cadangan uranium yang besarnya diperkirakan lebih dari 5.000 ton pada 1985 (Teheran Home Service, 1985 : BBC Monitoring).

Pada saat yang sama, lembaga-lembaga intelejen Barat lebih khawatir dengan pengembangan senjata biologis dan kimia, dan tak banyak memperhatikan pengayaan nuklir. Pengungkapan tahun 2002 tersebut terasa memalukan bagi lembaga-lembaga intelejen Barat. Kecurigaan AS ini diperparah oleh penundaan kunjungan pimpinan IAIE, Mohammad El-Baradei ke Natanz yang telah dijadwalkan pada November 2002. Iran merasa tidak perlu minta maaf , karena tindakan mereka sepenuhnya sesuai dengan system pengamanan yang ditentukan

oleh Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yang menyatakan bahwa mereka hanya perlu memberitahu IAIE jika bermaksud mengayakan uranium.

Keberadaan reaktor nuklir di Natanz dan Arak menunjukkan bahwa mereka bermaksud membangun fasilitas yang mengayakan uranium melalui pembangunan reactor air berat. Namun demikian, para pejabat Iran menyatakan mereka harus memberitahu IAIE hanya setelah hendak memulai proses pengayaannya. Dengan kata lain, setelah semua persiapan selesai. Menurut mereka, kerahasiaan persiapannya karena negara-negara nuklir itu sendiri tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan NPT untuk memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil di Iran, salah satu keuntungan dari menandatangani pakta (Ali M. Ansari 2006:227).

Iran melihat bahwa Israel serta Pakistan dan India juga telah memanfaatkan tenaga nuklir. Demi keadilan terhadap posisi Iran, argument Barat bahwa tak satupun negara-negara tersebut masuk dalam NPT, secara politis dan etis masih tetap meragukan. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang menandatangani pakta internasional jauh lebih dirugikan dari pada mereka yang melanggar konvensi internasional.

Amerika Serikat menuduh bahwa rezim yang berkuasa melalui Revolusi Islam akan membawa instabilitas di wilayah Timur Tengah dan mengancam kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, utamanya adalah yang berkaitan dengan sumberdaya alam energi gas dan minyak, serta eksistensi Israel sebagai sekutu utama mereka di kawasan. Amerika Serikat juga beranggapan bahwa meskipun upaya-upaya lobi internasional berhasil membatalkan sejumlah kerja sama antara Iran dengan negara-negara penyuplai kebutuhan program nuklirnya, Iran masih memiliki kemungkinan untuk menjalankan sebuah program nuklir dengan tujuan militer.

Kekhawatiran yang kurang berdasar ini, dan krisis internasional di Irak serta dorongan dari Eropa mulai meyakinkan Iran bahwa mereka lebih baik setransparan mungkin tentang program nuklirnya. Kekhawatiran ini meningkat setelah rezim Baa`th di Irak jatuh yang membuat kelompok garis keras Iran terkejut. Hal ini diikuti laporan IAIE yang mengecam Iran karena melanggar komitmennya di bawah peraturan NPT karena tidak sepenuhnya mengungkapkan kegiatannya.

Pada Februari 2003 IAIE merencanakan untuk melakukan kunjungan inspeksi ke fasilitas nuklir Iran. Kunjungan inspeksi tersebut direncanakan sebagai reaksi atas meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap program nuklir Iran. Kunjungan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Iran tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden Khatami dengan Ketua IAIE Mohammad El-Baradei. Dalam pertemuan tersebut pemerintah Iran setuju untuk memberikan informasi pendahuluan mengenai rencana pengembangan fasilitas nuklir baru (IRNA, 2 Juni 2003, BBC SWB Mon ME1 MEPol).

Presiden Khatami yang berharap laporan pendahuluan tersebut akan menjembatani kesalahpahaman yang terjadi tentang tujuan dari program nuklir Iran yang banyak disalah artikan oleh Barat. Hal ini juga dilakukan karena laporan IAIE yang mengecam Iran karena melanggar komitmennya di bawah peraturan NPT karena tidak sepenuhnya mengungkapkan kegiatannya.

Upaya Iran dalam mengembangkan program nuklirnya ini mendapatkan dukungan dari negara-negara non-blok. Pada 12 September 2003 dalam pertemuan *Board of Governors* IAIE, perwakilan Negara non-blok memuji dan mendukung upaya Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir, dan menyatakan bahwa setiap anggota NPT memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir damai. Namun demikian, IAIE tetap menuntut dan menentukan tenggat waktu untuk Iran untuk segera menyetujui Protokol Tambahan yang juga didukung oleh Eropa dan Barat (<http://iranexpert.com>, 2008).

Kebuntuan nuklir Iran terus berlanjut, dan banyak kelompok garis keras di Iran mendapat bahwa Iran seharusnya mundur dari NPT alih-alih membiarkan diri dikenai pemeriksaan yang memalukan. Berbeda dengan Irak, Iran belum pernah menginvasi Negara manapun dan juga belum pernah kalah dalam perang. Hal ini memang bisa dibenarkan tetapi akan membuat masalah menjadi lebih serius.

Cukup diragukan apakah Amerika Serikat akan pernah menganggap serius fungsi NPT dengan atau tanpa Protokol Tambahan. Tak ada negosiasi terperinci apa pun yang bisa membuat kedua pihak melepaskan realitas vital tersebut, dan mungkin proses negosiasinya sendiri telah memperburuk keadaan. Akhir masa pemerintahan kedua kepresidenan Khatami, tim Iran mencari saat terakhir untuk menawarkan kesepakatan komperhensif pada Maret 2005. Setelah ditolak, mereka mengancam akan memulai kembali pengayaan uranium dan kemudian mundur, menunggu tawaran balik Eropa bulan Agustus (Connie Bruck, 2006 : 56).

Dengan menekan Iran melalui NPT, Protokol Tambahan ini merupakan sebuah upaya yang kerdil yang dilakukan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka mencoba menekan Iran dengan menambah elemen kewajiban dimana awalnya merupakan perjanjian sukarela. Dimana yang sejak awal kita tahu bahwa penandatanganan non-proferasi ini memang sudah bermasalah. Dan ketika mereka menggunakan perjanjian lemah untuk menekan Iran menghentikan program nuklirnya, tentu saja hal ini akan dipertanyakan.

Dalam hal ini Amerika Serikat mengindikasikan bahwa mereka takkan senang kecuali Iran meninggalkan program nuklirnya. Amerika Serikat juga memanjakan diri sendiri dengan istilah perubahan rezim, yang langsung menimbulkan kekhawatiran keamanan Iran. Iran segera menyimpulkan bahwa tak ada kesepakatan dengan Eropa yang bernilai kecuali Amerika Serikat terlibat menjaminnya. Dan pada tahun 2004 situasi akan menjadi lebih sulit untuk

mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan politik di Republik Islam Iran.

Situasi setelah 2004 akan menjadi lebih rumit di beberapa sisi. Parlemen baru tak berniat meratifikasi Protokol Tambahan. Sebaliknya, mereka yakin tim negosiasi terlalu lunak pada Eropa dan seharusnya bersikeras mempertahankan hak nasional Iran. Penekanan pada nasionalisme ini penting karena Parlemen baru beralih ke retrotika nasionalis yang sensitif untuk menggalang dukungan masyarakat. Pengembangan nuklir, khususnya perlunya mengayakan uranium, menjadi isu simbolis yang takkan menoleransi pertanyaan apa pun, bahkan pertanyaan yang terkait dengan biaya pengembangan tersebut (Ali M. Ansari, 2006 : 242).

Protokol Tambahan takkan diratifikasi oleh Parlemen Baru yang konservatif, dan tim yang bertanggung jawab terhadap negosiasi menghadapi tantangan di dalam negeri sendiri. Kita akan melihat pola, bahwa kelompok garis keras di kedua belah pihak selalu menggunakan tekanan. Negosiasi nuklir ini menjadi tergantung pada tekanan politik dengan sifat yang sepenuhnya berbeda, yang mulai menunjukkan tidak akan ada kesepakatan apa pun dan konteks perdebatannya juga berubah.

Selama Khatami berkuasa dan masa bakti Majelis ke-6 belum berakhir, Amerika tidak akan mengambil tindakan militer terhadap Iran, karena Amerika akan menghadapi masalah dari dunia maupun opini publik. Namun melihat hasil pemilihan dewan (lokal) terkini, mereka mengantisipasi bahwa pemilihan berikutnya (pemilihan Majelis dan Presiden) akan menunjukkan hasil yang sama dengan pemilihan dewan. Dan berdasar premis tersebut, mereka menyiapkan dasar untuk segala aksi terhadap Iran (Baqi, Emadin. *Jurnal Reformis*, Juni 2003).

Tahun 2004 sampai 2008 adalah tahun konfrontasi antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran, hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bukanlah akibat dari isu nuklir. Masalah nuklir Iran ternyata adalah konsekuensi dari hubungan bersama yang traumatis, tidak ada nya kepercayaan di kedua kubu

menjadikan masalah nuklir ini hanya akan mengalihkan masalah yang sebenarnya menyangkut hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.

Negosiasi nuklir ini dimulai dengan atmosfer yang menakutkan bagi Iran, pandangan Iran terhadap perang Amerika Serikat di Irak kini mendapat sorotan mengenai rasa hormat. Mereka mempresentasikan bahwa hanya rasa takut yang membangun rasa hormat untuk Amerika Serikat di kawasan.

Pada musim panas 2004, pasukan Britania yang berpatroli di terusan Shatt-al Arab, yang memisahkan Iran dari Irak, ditangkap pasukan Garda Revolusi, penangkapan delapan tentara tersebut, beserta kapal-kapal mereka, menunjukkan indikasi nyata pertama bahwa politik memang berubah di Iran. Ini merupakan indikasi yang menarik dari pandangan politik Iran. Krisis itu sendiri terselesaikan dalam dua minggu, sebagian besar karena saluran-saluran yang berguna bisa dengan efektif melobi pembebasan cepat para tentara tersebut. (Ali M. Ansari, 2006 : 244).

Pertama, menunjukkan kompleksitas politik Iran dan cara kerja kekuasaan secara terdesentralisasi. Komandan setempat mungkin terpicu untuk mengambil tindakan, dan detail-detail aksi tersebut tergantung pada inisiatifnya sendiri. Anehnya, meski berulang kali berusaha menenangkan, Menteri Luar Negeri Iran tidak berkuasa untuk memaksakan kehendaknya atau kehendak pemerintah pada struktur komando Garda Revolusi. Garda Revolusi dipimpin sebuah struktur paralel yang mengusung independensi aksi mereka.

Kedua, mengindikasikan elemen-elemen dalam rezim menginginkan posisi yang lebih kuat terhadap Barat dan tidak takut memicu krisis. Penangkapan tiba-tiba tentara Britania juga menarik perhatian kita pada fakta bahwa situasi anarkis di Irak, yang jauh lebih besar dari sekedar upaya diplomatis ceroboh membuat

negosiasi nuklir, mungkin akan menjadi pemicu berlanjutnya Perang Dingin antara Iran dan Amerika Serikat.

Januari 2005, dalam sebuah wawancara televisi NBC, Presiden George W. Bush menanggapi perkembangan perkembangan negosiasi nuklir Iran menyatakan bahwa serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran adalah salah satu alternatif terutama jika Iran terus bersikeras untuk melanjutkan program nuklirnya. Hal ini didukung oleh Wakil Presiden Dick Cheney yang menyebutkan bahwa Iran menempati urutan teratas dalam daftar permasalahan global. Dan menyebutkan bahwa krisis nuklir Iran dapat memicu serangan *preemptive* (Reuters, 17 Januari 2005).

Kedua kelompok garis keras dalam rezim mengambil kesimpulan bahwa langkah keras adalah satu-satunya langkah maju. Disini penulis akan menjabarkan ketika kelompok-kelompok garis keras dari kedua kubu sedang dalam posisi memegang tampuk kekuasaan akan mempengaruhi negosiasi nuklir.. Sekali lagi, ketika terjadi generalisasi politik akan ada perubahan dalam cara pendekatan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran dan juga sebaliknya. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana generalisasi politik kelompok garis keras di kedua kubu jika bertemu dalam satu periode kepemimpinan.

Kita telah melihat bagaimana neokonservatif Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bush, dengan segala kekuatannya membawa Amerika Serikat masuk dalam pergulatan masalah di Timur Tengah. Namun kekuatan terbesar dunia ini ternyata tidak mampu membawa dirinya untuk bergumul dengan segala permasalahan di Timur Tengah, akibatnya metode-metode yang mereka terapkan justru menimbulkan banyak masalah di kawasan tersebut.

Sama halnya yang akan terjadi terhadap krisis nuklir Iran berikut, semua ini terjadi ketika kelompok neokonservatif di Iran mulai mengambil inisiatif untuk mengambil tongkat kekuasaan di Iran, yang dapat dilihat sebagai berikut :

Sejak pemilu parlemen ke-6 membawa kemenangan mutlak bagi kelompok Reformis, kemampuan konservatif telah berjuang untuk mengambil inisiatif politik. Mereka berusaha mencegah dan mengekang Parlemen Reformis melalui instrument yudisial dan seleksi legislasi oleh Dewan Pengawal yang berfungsi sebagai badan pengawas. Setelah tertahan gerakan reformasi, kaum konservatif berniat membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal yang lebih besar lagi dengan memanfaatkan para pejabat terpilih. Proses ini dimulai, dengan pemilu kota tahun 2003, Pemerintahan Kota Teheran, yang didominasi para Reformis, menjadi pusat konflik internal yang intens dan dramatis (Rice Outlines Next Steps in Iran Show, 20 September 2005, Time).

Pemilu tersebut menghasilkan yang konservatif untuk Teheran. Tetapi ini bukan dewan konservatif biasa. Dewan tersebut dipenuhi oleh kelompok garis keras, yang mengagumi dominasi kaum konservatif ambisius di Amerika Serikat. Ini merupakan sebuah reproduksi dalam politik Iran, dan hal ini tidak dapat diremehkan.

Merasa yakin Barat takkan memprotes dan sadar posisi regional Iran mekin hari makin kuat. Dewan Pengawal yang menjadi pengawas mendaftarkan calon prospektif untuk pemilu-pemilu mendatang. Sekitar 3000 dilarang. Akhirnya Pemimpin Tertinggi Ayatullah Khamenei campur tangan dengan mendesak Dewan Pengawal menunjukkan keseimbangan yang lebih besar. Dalam upaya mengembalikan kekuasaan mereka, kaum konservatif telah mengorbankan cukup besar wewenang, dan banyak kaum konservatif yang mengakui masalah ini. Tetapi mereka menganggapnya bisa ditangani, mungkin rakyat saat ini bersungut-sungut, tetapi nasionalisme dapat berfungsi sementara mungkin mitologi Islam tidak untuk mendapatkan dukungan orang-orang di belakang Republik Islam. Untuk ini mereka perlu musuh dan krisis yang pasti (Ali M. Ansari, 2006:237).

Lingkungan politik telah berubah. Kaum neokonservatif di Iran tak hanya makin percaya diri dengan posisi domestik mereka, tetapi posisi Iran dikawasan regional

dan internasional juga semakin kritis. Amerika Serikat mendapati Irak dan Afghanistan sulit dilibas, dan pengaruh politik Iran bertumbuh. Prospek dari Teheran tampak sangat bagus ketika penghancuran dua dari musuh-musuh terberat Iran menciptakan kekosongan geopolitik, menjadikan Iran kekuatan regional.

Pemilu mantan wali kota Teheran, Mahmoud Ahmadinejad, untuk menduduki kursi kepresidenan di Republik Islam sama-sama merupakan kejutan bagi si pemenang maupun para analis politik yang telah gagal total dalam membaca pertanda. Indikasi pertama Ahmadinejad akan menjalankan strategi berbeda untuk memperkuat dan memperluas basisnya muncul bersamaan dengan nominasi kabinetnya. Para nominenya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali dalam pemerintahan senior, yang bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang positif. Namun, latar belakang mereka dalam bidang keamanan dan intelejen membuat para pengamat khawatir, terlebih lagi, Ahmadinejad tampaknya berniat mencalonkan teman-teman lamanya, dari pemerintahan kota Teheran atau Garda Revolusi. Kekhawatiran bahwa presiden baru hendak menghapuskan banyak perkembangan bagus yang telah tercapai selama dekade sebelumnya, khususnya menyangkut hubungan internasional Iran. Bukannya meneruskan kebijakan keterlibatan yang dimulai Rafsanjani yang dengan antusias diteruskan oleh Khatami, Ahmadinejad justru berniat mengikuti jalur yang sangat berbeda, yang malah meningkatkan dan bukannya menurunkan ketegangan (Ali M. Ansari 2006:253).

Ahmadinejad adalah seorang neokonservatif, di level politik langsung kedatangannya menandai adanya perubahan kualitatif, tidak hanya perubahan tempo. Semua masalah pemerintahan sebelumnya dengan Amerika Serikat, dimana mereka percaya bahwa negosiasi tidak mustahil dan mereka menginginkan adanya hubungan. Sebaliknya, Ahmadinejad memandang Iran bisa mencari teman-teman lain atau terus tumbuh dalam isolasi yang menyenangkan dengan harga minyak yang tinggi.

Setelah melecehkan upaya Presiden Rafsanjani dan diteruskan secara antusias oleh Presiden Khatami untuk berdialog, neokonservatif Amerika Serikat sekarang menemukan lawan yang sepadan. Situasi ini akan menghasilkan

Eropa memberikan presentasi yang kurang antusias mengenai persyaratan mereka pada tahun 2005, mencerminkan kesedihan mereka atas perubahan situasi politik di Iran. Tawaran Eropa tidak sejelek apa yang berusaha dikemukakan oleh para politikus Iran yang tersinggung. Itu tawaran yang solid yang, menariknya, menghindari pemakaian istilah `penghentian pemanen`. Alih-alih mereka memilih menggunakan istilah `penghentian sementara` yang berjangka panjang. Pernyataan itu tentunya tidak menjamin permintaan maaf yang tampaknya dipermasalahkan tim negosiasi Iran yang baru (Ali M. Ansari 2006:260).

Dalam bahasa birokratis, tawaran ini sebenarnya tidak untuk menyinggung siapa pun. Sepertinya para politikus Iran sedang menikmati posisi isolasi yang mereka jadikan tujuan bangsa. Tak satu pun di Barat yang mengetahui bagaimana menghadapi presiden baru tersebut, yang pandangan nonortodoksnya dan politik garis kerasnya cukup menghawatirkan Barat.

Ketika generalisasi politik dari kedua negara berubah, berubah pula pendekatan yang mereka lakukan. Walaupun Amerika Serikat dan Republik Islam Iran memiliki kelompok garis keras yang terlihat memiliki banyak persamaan, ternyata arah perubahan yang terjadi justru sebaliknya.

Pemilih di Iran pada Juni 2005 memilih berdasarkan alasan domestik dan ekonomi yang masuk akal. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan para pemilih di Eropa dan cukup berbeda dari pemilih religius yang memilih kembali Presiden Bush tahun 2004. Seperti ditunjukkan dalam jajak pendapat pemerintahan, sekularisasi masyarakat Iran terus berkembang (Ali M. Ansari 2006:254).

Ini yang jarang diperhatikan oleh kemapanan politik di Amerika Serikat menyangkut generalisasi politik di Iran, Amerika Serikat sampai hari ini terus

memandang Iran sebagai aktor yang irasional dikarenakan Revolusi Islam. Dengan melihat perkembangan generalisasi politik di kedua negara, entah sadar atau tidak ternyata Amerika Serikat lah yang terlihat irasional. Iran terlihat terus maju menuju semangat modernisme sekuler, sedang Amerika Serikat terlihat masih terjebak dalam mitos-mitos lama mereka. Amerika Serikat terlihat kaku, tidak mampu memahami lawan politik nya dan tidak dapat berkompromi dengan baik.

Pidato kenegaraan (*state of the union address*) Presiden Amerika Serikat George Bush yang menyebutkan bahwa Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia karena kepemilikan senjata nuklirnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hamid Reza Asefi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bahwa senjata pemusnah massal atau senjata nuklir bukan merupakan bagian dari kebijakan pertahanan Iran (http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, *Rueters*, 17 Januari 2005).

Februari 2005, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Iran semakin gencar dilakukan, salah satunya adalah dengan membawa krisis nuklir Iran menjadi masalah internasional yang akan dibicarakan dalam kerangka Dewan Keamanan PBB. Disamping itu Amerika Serikat juga semakin menguatkan penerapan sanksi bagi Iran dengan mengeluarkan perintah untuk membekukan semua asset Iran yang disimpan di Amerika Serikat, termasuk milik AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*). Sanksi tersebut juga mencegah dan membatasi kegiatan-kegiatan bisnis lintas Negara kepada perusahaan manapun yang menjual peralatan pendukung untuk program nuklir. (http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, *Finacial Times*, 1 Juli 2005)

Konteks negosiasi berubah seiring berubahnya generalisasi politik, dimana awalnya Iran diperbolehkan mengakses teknologi nuklir jika pengayaan uranium dilakukan oleh Eropa, kini Iran dituduh sedang mengembangkan senjata nuklir dan ancaman bagi keamanan dunia. Ini menandai adanya pergeseran kebijakan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Republikan.

Negosiator nuklir yang baru sekarang mulai menganggap remeh kesepakatan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Sanksi-sanksi yang dipakai untuk melawan pemerintahan Khatami, termasuk dibawa ke Dewan Keamanan PBB, disambut dingin oleh tim baru ini.

Upaya untuk membawa masalah program nuklir Iran dilakukan oleh Perancis melalui pernyataan Presiden Perancis Jacques Chirac pada Juli 2005. Namun demikian, sanksi dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara Barat tersebut tidak berhasil menghentikan program nuklir Iran dimana pada Juli 2005 Utusan Iran untuk IAEA Mehdi Akhundzadeh dan Sirous Nasserri negosiator nuklir Iran mengirimkan surat kepada IAEA yang menyatakan bahwa Iran akan kembali menjalankan aktifitas nuklirnya di fasilitas pengayaan uranium Isfahan yang sempat disegel oleh IAIE (http://www.nti.org/e_e_research/profile/Iran.htm).

Republik Islam Iran sepertinya menaikkan taruhan, mungkin hal ini untuk memaksa keputusan. Strategi Iran tidak terlihat jelas dalam menantang Barat atas program nuklirnya. Walaupun teknologi nuklir merupakan hak setiap negara, namun masalah ini tidak bisa diaanggap remeh terlebih lagi Amerika Serikat telah menaruh semua opsi terhadap Iran, termasuk perang.

Januari 2006 Iran membuka segel internasional yang dipasang pada tiga fasilitas nuklir untuk meneruskan pengayaan uraniumnya. Ini adalah reaksi yang ditampilkan Iran untuk menegaskan bahwa mereka tidak ingin ditekan oleh Amerika Serikat dan Barat mengenai penghentian program nuklirnya.

Februari 2006 Presiden Ahmadinejad dalam kunjungannya ke Kuwait, menyebutkan bahwa pemerintah Iran menginginkan kawasan Timur Tengah bebas dari senjata nuklir. Ia menegaskan bahwa program nuklir Iran memiliki tujuan damai, dan bahwa sebenarnya negara-negara Adidaya dan negara penjajah yang memiliki senjata nuklir sebagai ancaman stabilitas yang sesungguhnya bagi kawasan Timur Tengah (<http://bbc.co.uk>, BBC, 27 February 2006).

Setelah pernyataan ini dan Iran kembali melakukan proses pengayaan uraniumnya, PBB pada tanggal 31 Agustus menerbitkan Resolusi 1696 agar Iran menghentikan semua aktifitas pengayaan uranium. Resolusi ini disetujui oleh 14 negara. Namun, seperti kelompok garis keras di Amerika Serikat yang enggan tunduk pada aturan-aturan internasional, Presiden Ahmadinejad menyatakan tidak akan tunduk pada ancaman apa pun.

Juni 2006, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyetujui proposal baru yang akan ditawarkan kepada pemerintah Iran. Proposal tersebut berisi intensif yang ditunjukkan untuk membujuk Iran menunda pengayaan uraniumnya, sekaligus kemungkinan pemberian sanksi apabila Iran menolak untuk memberlakukan penundaan. Dimana salah satunya isinya adalah kesediaan Amerika Serikat untuk berdialog dengan Iran (<http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>, 17 September 2008).

Namun seperti halnya proposal-proposal yang lain, ini juga akan ditolak oleh Iran. Hal ini dikarenakan Iran harus mematuhi dan melaksanakan penghentian pengayaan uraniumnya. Mereka memandangnya sebagai peraturan yang tidak adil, dimana Amerika Serikat cenderung memaksakan kehendaknya. Tidak hanya menolak,

Pada bulan November 2006, Iran menguji-coba rudal permukaan 2 yang diputuskan bertahap dengan operasi perencanaan yang tepat dan hati-hati. Menurut seorang ahli rudal senior Amerika (dikutip oleh Debka), "Iran memperlihatkan up-to-date teknologi peluncur-rudal dimana Barat tidak mengetahui bahwa Iran memilikinya." (Michel Chossudovsky, Iran's "Power of Deterrence" Global Research, November 5, 2006).

Latihan tahun 2006, sekaligus menciptakan sebuah gelora politik di Amerika Serikat dan Israel, dengan cara apa pun tidak mengubah keputusan Amerika Serikat-NATO-Israel untuk melancarkan perang terhadap Iran. Teheran telah menegaskan dalam beberapa pernyataannya bahwa Iran akan merespon jika

diserang. Israel akan menjadi tujuan langsung dari serangan rudal Iran seperti ditegaskan oleh pemerintah Iran. Oleh karena itu persoalan sistem pertahanan udara Israel penting. Amerika Serikat dan fasilitas militer sekutu di negara-negara Teluk seperti Turki, Arab Saudi, Afghanistan dan Irak juga bisa menjadi sasaran target Iran.

Sejak diajukan ke DK PBB tahun 2006, dibahas pada 23 Desember 2006, hingga menghasilkan Resolusi 1737. Inti masalah nuklir Iran adalah tidak adanya kepercayaan pada pengembangan teknologi nuklir Iran. Proses pengayaan uranium Iran ditengarai memperkuat kecurigaan itu. Iran dinilai tidak transparan. Resolusi 1747 meminta Iran transparan dan bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, menjadi pihak *Additional Protocol* IAEAs, dan menghentikan proses pengayaan uraniumnya. Laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 berbeda dengan laporan tahun 2006 dan 2007, basis lahirnya resolusi 1737 dan 1747 yang memberi sanksi kepada Iran. Laporan Dirjen IAEA kali ini menggarisbawahi adanya kerja sama dan transparansi yang diberikan Iran, termasuk kesepakatan tentang enam butir rencana kerja yang harus dipenuhi Iran (www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm).

Negosiasi ini seperti ladang ranjau kontradiksi, pihak-pihak yang secara tulus ingin mencari solusi ternyata mereka mencari solusi yang salah. Akibatnya negosiasi nuklir ini sangat mudah disabotase, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan lebih lanjut, yang membuat kemajuan lebih lanjut sulit dicapai. Negosiasi ini juga diiringi dengan ancaman serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel, di sisi lain Iran mencoba unjuk gigi dengan sering menggelar latihan militer di kawasan.

Rintangan-rintangan ini bersifat politis dan ideologis, dimana Amerika Serikat dan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan kelompok garis keras memperlihatkan keengganan mereka untuk mencapai kesepakatan apa pun. Didorong oleh perkembangan revolusi media massa terkini, membuat negosiasi

nuklir ini semakin mudah di telikung oleh kelompok-kelompok yang ingin mengaburkan segala kompromi. Bagaimanapun Amerika Serikat dan Republik Iran kini telah menjadi tetangga dan tidak hanya disatu daerah perbatasan.

REFERENSI

AB65/611 Iran: *Introduction of Nuclear Power, correspondence, 1969-1985.*

Ali M. Ansari. 2006. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.

Alexander. Y dan A. Nanes. 1980. *The United States and Iran: A Documentary History.* Maryland: University Publications of America. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra. Karen Amstrong. 2001 *The Battle for God, A History Of Fundamentalism.* New York Ballatine Publishing Group, a division of Random House, Inc

Alexis D Tocqville. [1835, 1840], 1958. *Democracy in America.* Terj. Phillips Bradley. New York: Vintages Books. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika.* Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

Associated Press, 4 Desember 2006. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan.* Yogyakarta: Bentang.

BBC SWB ME/1968 MED/17, 11 Oktober 2000. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.

Daniel L . Makalah disajikan dalam pertemuan tahunan American Political Science Association, Washinton D.C. Dreisbach. 1991. *In Pursuit of Religious Freedom: Thomas Jefferson`s Church State Views Revisited.*

David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika.* Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

David Held. 2000, *Regulation Globalization, international sociology.* Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika.* Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961

FCO 8/1882- Sir Patrick Wright to Sir Peter Ramsbotham, 9 November 1927. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.

FCO 8/-*Unrest in Iran*, 1972 : 4. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.

Greeley, Andrew M. 1981. *The Religious Imagination*. New York: Sadlier. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

Glock, Charles Y. 1972. *Images of God, Images Of Man, and the Organization of Social Life*. *Journal for Scientific Study of Religions*. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

James A. Bill, 1988. *The Eagle and The Lion: Tragedy of American-Iranian Relations*. New Heavens: Yale University Press. Dalam. Ali. M Ansari. 2006. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra

Kermit, Roosevelt. 1979. *Countercoup: the Struggle for the Control of Iran*. New York. MacGraw Hill. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.

Marsden, George, dan Logfield, Bradley J.ed. 1992. *The Secularization of the Academy*. New York: Oxford University Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.

Memoir Dr. Eternad, di akses
(www.iraniancom/books/march98/Nuclear/Images/p1.gif)

McDemortt, 10 November 1960. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.

Michel Chossudovsky. 2006. *Iran's "Power of Deterrence"*. Dalam Global Research.

Michael Gerson, kolumnis *Washington Post*, 2007. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.

Newsweek, 3 April 2006. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.

Prem 15/1684 *Meeting Shah-Rothchild, December 2, 1972*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.

Reuters, 17 Januari 2005. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.

- Rice Outlines Next Steps in Iran Show*. 2005, Time. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Robert N dan Bellah. 1975. *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial*. New York : Seabury. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Roof, Wade Clark dan Mc Kinney, William. 1987. *American Mainline Religion*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- The Times, 1980 : *Defence and Forigen Affairs*
- Times-Mirror. 1998. *The People, The Press, and Politics*. Post Election Typology Survey : Occasional Report. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Thomas Friedman, peneliti hubungan internasional dari *New York Times*, November 2003
- Wald, Kenneth D. 1992. *Religions and Politics in the United States*. Edisi Kedua. Washington, DC: Congressional Quarterly Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Yazdi. 1979. Where Now, : Documents from the US Espionage Den (63) US Intervention in Iran (12), Teheran, 1366/1987. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, Finacial Times, 1 Juli 2005
- http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, *Rueters*, 17 Januari 2005
- http://www.nti.org.e/e_research/profile/Iran.htm
- <http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>, 17 September 2008
- www.iran-press-service.com/articles_2002/jan_2002/afqanestan_iran-qaeda_18102

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sangat minim pengetahuan mengenai Iran, ditambah tidak adanya personel di lapangan menghasilkan kegagalan dalam berinteraksi. Amerika Serikat memperlihatkan pencegahan kedekatan hubungan, serta mengabaikan perubahan generalisasi politik di Iran, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi setelah revolusi tidaklah penting. Kegagalan tersebut menghasilkan kekosongan dalam pengambilan kebijakan, yang akhirnya akan diisi oleh hasutan dan retorika kosong.

Konsekuensinya kebijakan yang diambil lebih bersifat konfrontatif daripada konstruktif, menghukum daripada sebuah cara menuju sasaran. Amerika Serikat merubah sikap yang awalnya tidak peduli menjadi sangat perlu berbuat sesuatu, Iran bukan lagi masalah, tetapi sumber masalah. Faktanya masalah nuklir tahun 2003-2008 merupakan konsekuensi dari masalah yang jauh lebih luas antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Dimana ketiadaan bukti dalam pengembangan senjata nuklir oleh Iran dianggap sebagai bukti kesalahan.

Konfrontasi Amerika Serikat dan Republik Iran semakin meningkat akibat negosiasi nuklir, dan konfrontasi ini dapat berubah menjadi konflik. Iran dan Amerika Serikat pada hari ini telah menjadi tetangga di beberapa perbatasan sehingga peluang untuk terjadinya konflik semakin besar. Yang terpenting adalah struktur budaya hubungan kedua negara memang mendorong untuk konflik. Konflik yang mungkin diterima banyak orang, namun hanya sedikit yang memahaminya.

SARAN

Konfrontasi nuklir ini hanyalah sebuah konsekuensi dari masalah-masalah politik yang terjadi selama hubungan ini berlangsung. Permasalahan-permasalahan tersebut yang tidak pernah ditangani secara konstruktif oleh kedua belah pihak. Amerika Serikat seharusnya berfikir untuk menciptakan perdamaian bukannya memenangkan peperangan, permusuhan yang ada saat ini terbangun di atas hubungan erat masa lalu. Untuk mengatasi masalah ini serta melihat bagaimana mengatasi permasalahan budaya memerlukan pemimpin dengan imajinasi yang tinggi, visi, serta keberanian yang luar biasa. Dinding ketidakpercayaan telah terbangun selama puluhan tahun dan harus dihancurkan, sedikit demi sedikit. Bukan tugas mudah memang, tapi itu perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB65/611 Iran: *Introduction of Nuclear Power, correspondence, 1969-1985.*
- Alexander. Y dan Nanes.A. 1980. *The United States and Iran: A Documentary History.* Maryland: University Publications of America. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- Amstrong, Karen. 2001 *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Yahudi, Kristen.* Bandung. Mizan Pustaka Anggota IKAPI.
- Ansari M. Ali. 2006. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- Associated Press, 4 Desember 2006. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan.* Yogyakarta: Bentang.
- Azimi F. 1999. *The Crisis of Democracy: Iran.* Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- BBC SWB ME/3120 MED/2, wawancara CNN 8 januari 1998. *President Khatami address Iranian expatriates in the USA.*
- BBC SWB Mon ME1 MEPol, IRIB. 2002. *Demonstrators support Khamene`i, call for trial of fifth columnist.*
- BBC SWB ME/1968 MED/17, 11 Oktober 2000. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- BBC SWB ME/3763 MED/8, 2000 : IRNA.
- BBC SWB ME/4027 MED/9, 2000 : IRNA.
- Bellah, Robert N. 1975. *The Broken Covenant: American Civil Religion in a Time of Trial.* New York : Seabury. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika.* Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Bill, James.A. 1988. *The Eagle and The Lion: Tragedy of American-Iranian Relations.* New Heavens: Yale University Press. Dalam. Ali. M Ansari. 2006. *Supermasi Iran.* Jakarta:

- Zahra Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan. Ch.1
- Bruck, Connie. 2006. *How Iran`s Expatriates Are Gaming the Nuclear Threat*. The New Yorker, Exiles. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Calrsnaes, 2002. Dalam Suffri Yussuf,1989. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chossudovsky, Michel. 2006. *Iran's "Power of Deterrence"*. Dalam Global Research.
- David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Dreisbach, Danniell L. 1991. *In Pursuit of Religious Freedom: Thomas Jefferson`s Church State Views Reviseted*. Makalah disajikan dalam pertemuan tahunan American Political Science Assosiation, Washinton D.C.
- Emadin, Baqi. 2003. *Jurnal Reformis*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961
- FO 371 127075 EO 1015/39 Internal Political Situation, 28 Agustus 1957.
- FO 37149761 EP1015/143 Internal Political Affairs, 23 Desember1960.
- FCO 8/1882- *The Survival of the Persian Monarchy*, 8 Juni 1972.
- FCO 8/1882- Sir Patrick Wright to Sir Peter Ramsbotham, 9 November 1972.
- FCO 8/-*Unrest in Iran*, 1972 : 4
- Friedman, Thomas, *peneliti hubungan internasional dari New York Times*, November 2003.
Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- George Allen &Unwin,1982. Diakses www.wikipedia.com
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Gerson, Michael, kolumnis *Washington Post*, 2007. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- Glock, Charles Y. 1972. *Images of God, Images Of Man, and the Organization of Social Life*. *Journal for Scientific Study of Religions*. Dalam David C. Leege dan Lyman A.

- Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Greeley, Andrew M. 1981. *The Religious Imagination*. New York: Sadlier. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Hajizadeh, M. 2002. *Aqazadeh-ha*, Jameh Daran, Teheran, 1381. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Held, David. 2000, *Regulation Globalization, international sociology*. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- IRNA, 2 Juni 2003. *Komentar Menteri Luar Negeri Kharazi di PBB New York*. AFP. Di akses melalui BBC SWB Mon ME1 MEPol.
- Kartodirjo, Sartono.1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI.
- Laporan McDemortt, 10 November 1960. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Marsden, George, dan Logfield, Bradley J.ed. 1992. *The Secularization of the Academy*. New York: Oxford University Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt,2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Memoir Dr. Etemad, di akses (www.iranian.com/books/march98/Nuclear/Images/p1.gif).
- National Prayer Breakfast*, Washington, D.C, 7 Februari 2008. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang
- Newsweek, 3 April 2006. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- Prem 15/1684 *Meeting Shah-Rothchild, December 2, 1972*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Reform, Land 8 Maret 1980. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Reuters, 17 Januari 2005. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- Rice Outlines Next Steps in Iran Show*. 2005, Time. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra

- Roof, Wade Clark dan Mc Kinney, William. 1987. *American Mainline Religion*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Roosevelt, Kermit. 1979. *Countercoup: the Struggle for the Control of Iran*. New York. MacGraw Hill. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Tehran Home Service, 12 januari 1985, *BBC monitoring*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Tracy, David. 1975. *Blessed Rage for Order, The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York: Crossroad. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Times-Mirror. 1998. *The People, The Press, and Politics*. Post Election Typology Survey : Occasional Report. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Tocqville, Alexis D. [1835, 1840], 1958. *Democracy in America*. Terj. Phillips Bradley. New York: Vintage Books. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Thomas Friedman, peneliti hubungan internasional dari *New York Times*, November 2003
- The Times, 1980 : *Defence and Foreign Affairs*
- The Gathering Crisis in Iran. 1978. Dalam Documents from the US Espionage Den. US Interfention.
- Wald, Kenneth D. 1992. *Religions and Politics in the United States*. Edisi Kedua. Washington, DC: Congressional Quarterly Press. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Yazdi. 1979. Where Now, : Documents from the US Espionage Den (63) US Intervention in Iran (12), Teheran, 1366/1987. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Zaydabadi Ahmad, 2002 : *BBC SWB Mon ME Pol*. Dikutip dalam situs ISNA.
- http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran.htm
- <http://bbc.co.uk>. BBC, 27 February 2006
- <http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>.

<http://nsarchive.chadwyck.com>

www.iran-press-service.com/articles_2002/jan_2002/afqanestan_iran-qaeda_18102

www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm

<http://iranexepert.com>

www.wikipedia.com

http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, *Finacial Times*, 1 Juli 2005

http://www.nti.org/e_research/profiles/iran.htm, *Rueters*, 17 Januari 2005

http://www.nti.org/e_research/profile/iran.htm

<http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>, 17 September 2008

Labib, M. 2007. *Kronologi Krisis Program Nuklir Iran*. Dalam Sejarah Antar Bangsa. Jakarta. Mizan Pustaka.

Morgenthau, H. J. 2008. *Teori Realisme Politik*. Dalam J.D. Soresen Pengantar Hubungan Internasional. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.